

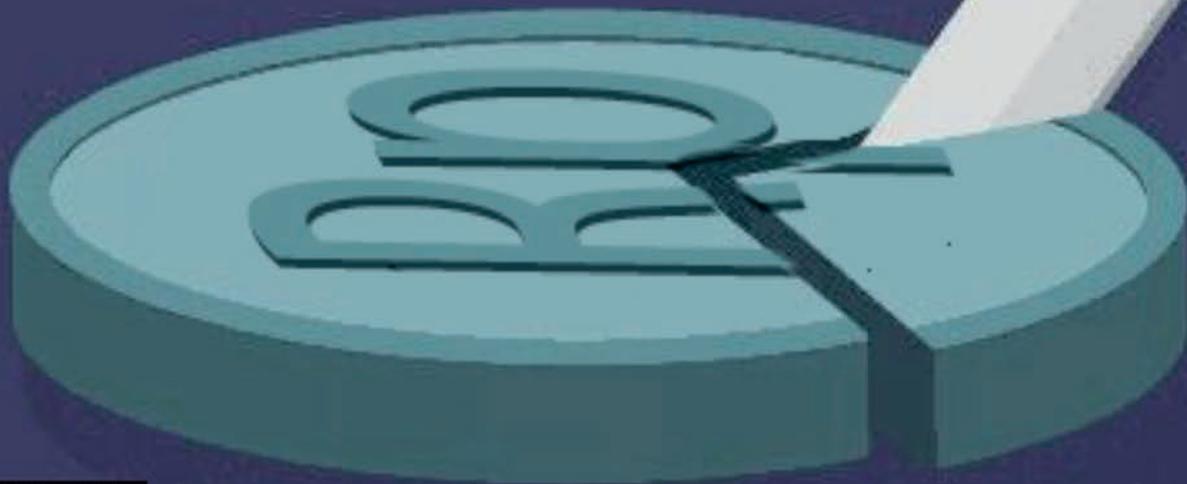


Volume 1 No 3 | Agustus 2016

mediaBPP

Jendela Informasi Kelitbangan

ANGGARAN KELITBANGAN



BPP DAERAH

WAJAH BARU BPP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAERAH

**DENYUT WISATA KUTAI KARTANEGARA
STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)**



<http://litbang.kemendagri.go.id>
Majalah Dwi Bulanan
p-ISSN 2503 3352
e-ISSN 2528 4181

DIRGAHAYU REPUBLIC INDONESIA



Pada Agustus ini, menyambut HUT RI yang ke-71, tidak hanya semangat kemerdekaan yang membara dalam setiap diri bangsa Indonesia, tetapi juga semangat yang tertuang pada segenap redaksi MediaBPP menginjak penerbitan ke-4 wajah baru Media BPP.

Pasalnya, kami tidak lagi tampil secara cetak, namun tampil secara *online* melalui *e-magazine* yang ditampilkan dalam portal *litbang.kemendagri.go.id*. Alasan itu kami tempuh karena kami ingin mengikuti zaman yang kian modern dan maju. Untuk itu, kami tidak ingin tergerus oleh zaman, dan menjadi yang tertinggal.

Meski begitu, kami berjanji untuk terus konsisten memberikan informasi kelitbangan yang aktual serta rutin setiap dua bulan sekali. Sesuai dengan *take line* kami "*Jendela Informasi Kelitbangan*".

Pada edisi perdana *online* ini, kami menyuguhkan Laporan Utama terkait anggaran Kelitbangan pada beberapa Kementerian dan Lembaga, seiring dengan keluarnya PMK 106 Tahun 2016 tentang SBK (Satuan Biaya Keluaran) yang diharapkan dapat memudahkan para peneliti melakukan penelitiannya.

Namun di satu sisi, ada banyak kendala yang dialami Ke-



menterian dan Lembaga dalam penerapan PMK tersebut. Seperti yang terjadi dalam BPP Kemendagri dan Kementerian lainnya. Semuanya kami rangkum dalam Laporan Utama, yang juga menyuguhkan pemberitaan tentang bagaimana Ragam Pengelolaan Anggaran Litbang pada setiap Kementerian. Cara ini kami ambil, untuk mengetahui sudah sejauh mana Lembaga Litbang bekerja serius dalam mendukung kinerja pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, kami juga menyuguhkan berbagai laporan terkait semarak kemeriahan Hari Kemerdekaan di lingkungan Kemendagri yang diisi berbagai macam perlombaan dan puluhan hadiah.

Di rubrik Daerah, kami menyuguhkan langsung laporan dari Tenggarong, Kalimantan Timur yang menonjolkan tempat wisata menarik dan hidup. Dengan destinasi andalannya Pulau Kumala, Sungai Repopo, dan Museum Mularman yang berisi koleksi seni dan sejarah budaya Kukar.

Akhir kata, semoga keberadaan Media BPP yang beralih ke *online* ini, tetap menjadi sumber referensi terpercaya pembaca sekalian, sebagai Jendela Informasi Kelitbangan yang hadirnya selalu ditunggu, dipercaya, dan aktual.

Redaksi

mediaBPP

Diterbitkan oleh
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Media BPP menerima Opini, Cerpen,
dan Surat Pembaca.
Kirimkan Opini, Cerpen, dan Surat Pembaca Anda
melalui surel kami ke alamat di bawah ini.

Alamat Redaksi
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
mediabppkemendagri@gmail.com

PELINDUNG	MENTERI DALAM NEGERI Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB	Domoe Abdie
PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDAKTUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Syabnikmat Nizam Subiyono Rochayati Basra Indrajaya Ramzie
PENYUNTING	Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy Niyun Nurin Ridha Putri
PELIPUTAN	M. Saidi Rifky Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	M. Saidi Rifky



Pojok Konsultasi

Poli umum, poli gigi, dan program BPJS merupakan faskes dan program yang secara umum disediakan guna menunjang kesehatan jasmani para pegawai. Namun, bagaimana dengan kesehatan mental?

Seperti diketahui bahwa kesehatan mental erat kaitannya dengan kesehatan jasmani. Jika gangguan mental terjadi, tentunya risiko sakit pun dikhawatirkan dapat meningkat. Apabila hal ini diabaikan secara terus menerus, gangguan mental dapat berakibat fatal pada performa kerja pegawai. Maka, sudah selayaknya instansi mulai mempertimbangkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan mental dalam bentuk pelayanan konsultasi bagi pegawai.

Melalui 'pojok konsultasi', pegawai dapat berkonsultasi seputar masalah keuangan, rumah tangga, pekerjaan dan lain-lain. Tentunya, praktek konsultasi harus dilakukan oleh seorang psikolog profesional yang dapat menjaga kerahasiaan si pasien.

Dengan begitu, karyawan dapat berbagi masalah mereka kepada 'orang yang tepat' dan 'mendapatkan saran objektif, bukan opini subjektif'.

Dyah Laksita
Peneliti BPP

Memang benar Sdri. Dyah, kesehatan jiwa atau kesehatan psikis sangat menentukan keberlangsungan dalam bekerja, namun sayangnya hanya sedikit perusahaan atau kementerian terkait yang menyediakan jasa konsultasi untuk para pegawainya. Semoga saran dari Sdri. Dyah ini dapat menjadi pertimbangan Bagian Umum untuk menyediakan jasa dan ruang konsultasi pada pegawai BPP Kemendagri.

Redaksi



Memperanyakan Partisipasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam Lomba Kemerdekaan

Semarak HUT RI ke-71 dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan Indonesia di lingkungan Kementerian Dalam Negeri kemarin memang berlangsung sangat meriah dan sukses. Diikuti

oleh seluruh komponen, Kemendagri bisa dikatakan berhasil menciptakan spirit kemerdekaan di lingkungannya. Namun sayangnya keterlibatan PTT (Pegawai Tidak Tetap) masih sangat minim dan seolah dibatasi dalam mengikuti segala macam perlombaan, padahal dalam bekerja, PTT dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) selalu beriringan dan tidak pernah ada batasannya. Saya berharap pada masa yang akan datang, keterlibatan PTT bisa lebih diperhitungkan, karena keberhasilan setiap komponen Kemendagri dalam lomba Kemerdekaan RI kemarin juga bergantung pada kerja keras dan kekompakan antara PTT dan PNS.

Supriyoko

Staf PTT Bagian Perencanaan BPP Kemendagri-

Ya betul, acara memperingati HUT RI ke 71 di lingkungan Kemendagri kemarin memang berlangsung sangat meriah, berita soal semarak Kemerdekaan tersebut dapat terlihat di rubrik Aktivitas BPP Kemendagri. Namun memang, keterlibatan PTT di dalamnya kurang, banyak panitia mensyaratkan perlombaan diwakili PNS pada tiap-tiap komponen. Mungkin hal itu dilakukan oleh panitia pusat untuk mengikat kebersamaan dan kerjasama antar PNS. Tapi saran dari Sdr. Supri sangat membantu dan memberikan pencerahan tentang keterlibatan PTT yang tidak bisa terlepas dari kinerja BPP Kemendagri. Semoga saran saudara dapat menjadi pertimbangan di semarak kemerdekaan 17 Agustus mendatang.

Redaksi

Evaluasi Perayaan Kemerdekaan

Dalam rangka memperingati hari ulangtahun ke 71, Kemendagri mengadakan acara dengan berbagai perlombaan yang meriah seluruh komponen. Menurut saya, ini sangat menarik dan positif karena setiap komponen dapat mempererat tali silaturahmi dan dapat menampilkan bakat-bakat yang dimiliki.

Saya sebagai peserta merasa senang dengan acara tersebut. Tetapi, banyak hal-hal yang harus diperbaiki, contohnya dalam peraturan perlombaan. Disaat perlombaan berlangsung tidak sesuai dengan peraturan awal. Tidak sedikit ada peraturan yang berubah disaat pelaksanaan, ada peraturan yang tidak efektif dan membuat banyak peserta kecewa dengan perubahan tersebut.

Selain itu, saat pembagian *doorprize*, tidak semua peserta mendapatkan kupon undian. Tentu saja ini membuat banyak peserta kecewa. Saya berharap acara ini pada waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi, tidak ada perubahan jadwal dan peraturan secara mendadak, dan semuanya mendapatkan kupon undian yang sama. Hidup Indonesia, hidup Kemendagri. Merdeka !!!

Dwi Indarti

Staf JFU Bagian Perencanaan

Terimakasih sekali atas masukan dari Sdri. Dwi yang menjadi pembelajaran untuk panitia 17 Agustus Kemendagri. Semoga Kemendagri dapat melaksanakan HUT RI yang lebih baik lagi.

Redaksi

BPP DAERAH 22

Meningkatkan Kapasitas Melalui Pendekatan Sosial

SEJUMLAH SKPD tidak terkecuali lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah terus berpacu dengan waktu menentukan setiap program yang siap dieksekusi pada tahun anggaran yang sudah direncanakan. Program-program unggulan pun dibentuk sedemikian rupa. Upaya memperbesar alokasi anggaran dari APBD dilakukan, tetapi realisasi dan serapannya tidak sesuai yang diharapkan.



AKTIVITAS

Pembinaan
Jurnal BPP Daerah 26
Semarak 17 Agustus 27
Menulis Cerita Perubahan 29

TOKOH

Fajar Riza UI Haq
(Ma'arif Institut) 38

SASTRA

Narasi Seorang Petani 42

JEPRET

Adu Otot 7-8
Pesona Bahari 44-45

KOMIK 40

RESENSI FILM

Menghidupkan Kembali
Warkop DKI 46

RESENSI BUKU

Dinamika Konsolidasi
Demokrasi Indonesia 47

KILAS BERITA 49&55

GAYA HIDUP

Tanam Benang, Baikkah? 50

OPINI

Kebijakan
Reklamasi Teluk Jakarta
dan Implikasinya 53
Pendanaan
bagi Peneliti 57

CATATAN

Pencoleng Tambang 58

DAERAH 30 & 34

Denyut Wisata Kutau Kartanegara

Keramaian seakan hidup di setiap sudut Kota Tenggarong, Kutau Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sepanjang jalan K.H Ahmad Muksin berderet hotel dan penginapan yang berhadapan langsung dengan Sungai Mahakam. Ketika liuknya melintasi Tenggarong, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur itu, kini tidak lagi menyeramkan. Spot-spot wisata diciptakan dan Tenggarong semakin ramai dengan hiruk pikuk wisatawan.

Penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja BPP Daerah

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi penyiapan pedoman penyusunan struktur organisasi perangkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pedoman perangkat daerah yang bersifat lintas urusan dipercayakan pada Kementerian Dalam Negeri, salah satunya adalah BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan).

LAPORAN UTAMA 8

ANGGARAN KELITBANGAN

Anggaran penelitian yang tidak menentu setiap tahunnya, membuat seluruh bagian perencanaan dan keuangan setiap BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) di kementerian dan lembaga (K/L) harus berputar otak mengatur pengelolaan anggaran yang terkadang fluktuatif setiap tahunnya. Oleh sebab itu, beberapa kementerian bahkan tidak jarang menggunakan sumber anggaran lain agar program yang sudah dicanangkan tetap berjalan, ada yang menggunakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bahkan hibah dari pihak lain. Lalu seperti apa beberapa lembaga litbang kementerian mengelola anggaran yang tersedia? Sudah efektifkah menjalankan tugas pokok dan fungsinya?





ADU OTOT. Peserta tarik tambang BPP Kemendagri dalam kemenangan acara HUT RI ke 71 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Acara juga diikuti oleh seluruh komponen Kemendagri dengan beberapa perlombaan olahraga, seperti futsal, volley ball, badminton, dan sebagainya

LAPORAN UTAMA

ANGGARAN KELITBANGAN

ANGGARAN PENELITIAN YANG TIDAK MENENTU SETIAP TAHUNNYA, MEMBUAT SELURUH BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETIAP BPP (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L) HARUS BERPUTAR OTAK MENGATUR PENGELOLAAN ANGGARAN YANG TERKADANG FLUKTUASI SETIAP TAHUNNYA. OLEH SEBAB ITU, BEBERAPA KEMENTERIAN BAHKAN TIDAK JARANG MENGGUNAKAN SUMBER ANGGARAN LAIN AGAR PROGRAM YANG SUDAH DICANANGKAN TETAP BERJALAN, ADA YANG MENGGUNAKAN PNB (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK) BAHKAN HIBAH DARI PIHAK LAIN. LALU SEPERTI APA BEBERAPA LEMBAGA LITBANG KEMENTERIAN MENGELOLA ANGGARAN YANG TERSEDIA? SUDAH EFEKTIFKAH MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA?



RAGAM PENGELOLAAN ANGGARAN BPP

Pada penerbitan kali ini, tim Media BPP mendatangi beberapa Litbang Kementerian terkait, seperti BPP Kementerian Dalam Negeri, BPPP (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan) Kementerian Perdagangan, dan Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Semua BPP K/L yang kami kunjungi memiliki berbagai pola anggaran dan sistem perencanaan yang berbeda juga. BPPP Kementerian Perdagangan bisa dikatakan litbang yang terstruktur dan menerapkan disiplin tinggi, Litbang Kementerian Kesehatan bisa dikatakan litbang yang sibuk dengan banyak program penelitian, dan BPP Kementerian Dalam Negeri bisa dikatakan sedang bergerak menjadi lebih baik, dengan turut serta pada RKN (Rencana Kerja Nasional). Untuk mengetahui lebih jelas, mari simak pemaparan di bawah ini.

BPP Kemendagri

Saat tim Media BPP menemui Mohammad Noval, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Media BPP mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan anggaran di lingkungan BPP Kemendagri. Dalam tiga tahun anggaran APBN, jumlah anggaran BPP Kemendagri mengalami pasang-surut. Pada 2015, BPP Kemendagri menerima APBN sebesar 64,9 milyar, pada 2016 menurun 55,9 milyar, dan pada 2017 naik 61 milyar. "Semuanya dibagi ke 4 pusat," katanya.

Empat pusat tersebut terdiri dari Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Puslitbang Inovasi Daerah, Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Sekretariat BPP. "Memang kebanyakan anggaran digunakan untuk Sekretariat. Lebih banyak untuk belanja operasional seperti gaji pegawai dan fasilitas operasional perkantoran," kata Noval.

Seperti yang tertera pada porsi perbandingan anggaran yang diberikan Noval pada tim Media BPP. Di sana tertulis, pada 2015 belanja operasional mendapat persentase 55,25 persen, sementara belanja non-operasional 44,75 persen. Pada 2016 operasional 74,09 persen, dan non operasional 25,91 persen, dan pada 2017 operasional mendapat persentase 74,7 persen dan non operasional 25,3 persen.



Anggaran yang sedikit pada porsi puslitbang tersebut seolah dibagikan secara merata ke empat pusat yang ada. Seperti pada tahun ini saja, Pusat I mendapat 4,08 persen, Pusat II 5,04, Pusat III 4,83, dan Pusat IV 5,30 persen. "Saya sebenarnya tidak suka pola anggaran keseragaman pada masing-masing pusat. Tidak ada unsur mengedepankan prioritas atau semacam persaingan kualitas dalam pelaksanaan program kegiatan, saya mencoba mendukung itu. Tapi coba lihat saja, hanya belakang dan receh-recehnya saja yang berbeda. Padahal saya sudah

pernah menerapkan ini, tapi mengapa balik lagi ke pola keseragaman," kata Noval.

Rencana Kerja Nasional

Untuk itu, agar BPP Kemendagri tidak dipandang sebelah mata terus menerus dalam hasil penelitiannya, BPP Kemendagri masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam RKP tersebut, BPP Kemendagri tidak mendapatkan anggaran tambahan lagi, melainkan mengambil dari anggaran yang ada. "Dengan kita masuk di RKP, kita berharap ada keseriusan untuk

berpartisipasi dalam penunjang pemerintahan, ada wujud nyata tidak hanya konsep-konsep laporan penelitian. RKP itu nantinya sebuah program kelibangan yang sudah ditetapkan. Jadi yang mengajukan tidak bisa ganti judul seenaknya, karena ditetapkan dari Perpres 45 tahun 2016 tentang RKP 2017 yang anggarannya dari APBN. Kalau judulnya ingin diubah, itu akan repot membahasnya sampai Bappenas. Karena waktu pengajuannya juga alot sampai Bappenas. Jadi jangan sampai kita main-main dengan program ini," tandasnya.



Noval sendiri menambahkan, masing-masing pusat sudah merancang kelibangan dalam RKP yang nantinya bisa bermanfaat bagi Kemendagri. Seperti pada Pusat I (Polpum) yang akan melakukan penilaian *Leadership Award* untuk para pemerintah daerah. “Itu artinya mereka harus merumuskan daerah-daerah mana saja yang kepala daerahnya bagus dan menjadi teladan dalam menjalani pemerintahan. Mereka akan melakukan perhitungan terkait penyelenggaraan pilkada yang efektif,” paparnya.

Sementara pada Pusat II (Adwil, Pemes, dan Kependudukan) akan mengadakan pencarian model penerbitan akta kelahiran yang cepat. Karena selama ini pembuatan akta kurang cepat hanya ada di beberapa daerah seperti di Jawa Timur yang dapat menerbitkan akta kelahiran secara cepat. “Mereka akan mencari model-model daerah mana yang tercepat dan terbaik dalam penerbitan akta kelahiran. Mereka akan merumuskan 1 model, merekayasa model itu pada daerah-daerah yang menjadi *pilot project* daerah. Lalu akan menyampaikan bagaimana cara penerbitan akta kelahiran yang bagus seperti apa,” jelasnya.

Kemudian di Pusat III (Pusat Inovasi Daerah) akan melakukan penelitian inovasi daerah terkait, terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan publik,

daya saing, dan pemberdayaan masyarakat. “Apakah inovasi setiap daerah sudah terasa di masyarakat. Nanti kita lihat semua persyaratannya, ada banyak sekali klasifikasinya,” ujarnya.

Selain itu, pada pusat III juga akan mencari contoh daerah yang pelayanan administrasinya mudah dan cepat lalu diimplementasikan *pilot project* di daerah tertinggal. “Inilah bedanya di 2016 dengan 2017. Jadi ada muatan prioritas nasional. Diharapkan hasil-hasil kelibangan secara nyata dapat diimplementasikan, dalam merintis suatu model,” jelas Noval.

BPPP Kemendag

Berbeda dari BPP Kemendagri, BPPP Kemendag rupanya lebih terstruktur dan terorganisasi dalam merancang program penelitian yang telah mereka tetapkan satu tahun sebelumnya. Saat menyambangi kantor BPPP Kemendag, kami disambut oleh **Septo Soepriyatno**, Kepala Sub Bagian Anggaran BPPP. Septo mengatakan, BPP Kemendag memulai penelitian terstruktur dan patuh terhadap bulan yang sudah dijadwalkan.

“Judul penelitian kita dapat informasi dari tahun sebelumnya, dimulai dari Februari tahun sebelumnya, kita melibatkan tim ide teknis sendiri dari

Kemendag, menyampaikan isu-isu apa saja yang berkembang di tahun berikutnya. Entah itu dalam negeri atau luar negeri. Kita sampaikan apa-apa saja. Nanti ada tanggapan dari unit. Unit sekaligus meminta kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Dari situ kita diskusi-diskusi internal yang menghasilkan judul yang tepat, pada saat penyusunan renja yang masuk ke anggaran, kemudian masuk ke DIPA,” ungkap Septo.

Kemudian, pada akhir Februari mereka akan membahas rancangan operasional penelitian, membahas mengenai latar belakang penelitian, metodologi sampai siapa saja yang dilibatkan dalam penelitian itu.



“Kita pakai akademisi. Misal IPB ahli sawit kita perlu masukan dan berkolaborasi. Di situ kita bahas. Kemudian pada pertengahan tahun hasil rancangan penelitian tersebut itu sudah mendekati 90 persen, udah hampir jadi semua tinggal survey dan pengelolaan data. Lalu pada bulan ke-10 kita juga bahas pembahasan hasil kajian. Untuk mengetahui bagaimana hasilnya, kita juga undang mitra kajian, tim evaluator atau sekarang tim kajian. Dan pada akhir penelitian kita buat semacam buku yang menjadi rujukan kementerian sebagai landasan kebijakan. Jadi penelitian kita bukan penelitian dasar, melainkan sudah dalam bentuk terapan dan tindak lanjut,” jelasnya.

Ditanya terkait pendisiplinan jadwal, Septo mengaku selama ini tim nya selalu kooperatif dalam mematuhi jadwal yang sudah dirancang bersama, karena terkait laporan pertanggungjawaban dan sebagainya. “Kita di sini sangat disiplin, atasan kami bisa memberi sanksi yang tegas berupa teguran yang tidak disiplin atau main-main,” tandasnya.

Balitbang Kemenkes

Berbeda dari dua kementerian di atas, Balitbang Kemenkes boleh jadi mendapat anggaran yang besar dan

jumlahnya cukup fantastis. Pada 2016 saja mendapat anggaran 1,1 Triliun dari APBN dan PNB, sementara untuk 2017 mendapat 1,13 triliun, dan setiap tahunnya selalu naik.

Namun, anggaran yang tidak sedikit itu, sebagian besar memang digunakan untuk penelitian yang diprogramkan khusus oleh Kementerian Kesehatan. Dari total anggaran 2017, kebutuhan untuk gaji para pegawai mendapat porsi 158,7 miliar, PNB 3,1 miliar, Operasional 74,6 miliar, Manajemen 80,4 miliar, Alat 26,7 miliar, Gedung 74,8 miliar, dan penelitian 716,1 miliar. “Jadi bisa dibayangkan 70 persen dana yang kita dapat itu untuk penelitian,” ungkap Nirmala Ahmad Ma’ruf Kabag Perencanaan dan Informasi Balitbang Kementerian Kesehatan.

Tujuh puluh persen anggaran tersebut kemudian dibagi untuk enam penelitian. Yakni Riskesnas (Riset Kesehatan Nasional), Riset Prioritas, Riset Tupoksi, Riset Kajian, Riset Kompetitif, dan Riset Kontijensi. “Yang kami utamakan memang Riskesnas ya, karena sebelum 2014, program Riskesnas kami hanya satu dalam setahun, sekarang ada tiga penelitian yang kami fokuskan,” terangnya.

Riskesnas sendiri mendapat porsi sekitar 476 miliar atau hampir 58 persen dari kelima riset yang ada. Pada 2017, program yang diutamakan dalam Riskesnas Kemenkes lainnya berupa survei kesehatan indikator nasional. “Kita punya tugas untuk mengevaluasi kinerja dari program, dari sisi masyarakat. Misal cakupan imunisasi selama ini laporannya yang kita dengar dari tim fasilitator (bidan atau posyandu setempat), sekarang kita coba wawancara masyarakat, benar sudah diimunisasi atau belum. Setelah selesai kita membandingkan data dari masyarakat dan fasilitator. Benar terlaksana tidak. Selain itu kita ada IPKM (Indikator Prestasi Kesehatan Masyarakat di daerah), kita bisa *ranking* mana saja daerah yang sudah maju, mana yang belum,” katanya.

Dari satu penelitian dalam Riskesnas saja, Ma’ruf menjelaskan, dibutuhkan

sekitar 80-90 miliar yang dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan. “Bisa dibayangkan betapa kewalahan kami, belum riset permintaan program dan sebagainya,” tambahnya.



PADA 2016 BALITBANGKES MENDAPAT ANGGARAN 1,1 TRILIUN DARI APBN DAN PNB, SEMENTARA UNTUK 2017 MENDAPAT 1,13 TRILIUN, DAN SETIAP TAHUNNYA SELALU NAIK. STRUKTUR ANGGARAN BALITBANGKES, 70 PERSEN DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN

Sementara, riset yang lain seperti riset prioritas merupakan riset yang berbasis prioritas dari program yang sudah dicanangkan selama setahun. Dan riset tupoksi lebih kepada kebutuhan pusat dan permintaan daerah. Masing-masing riset tersebut mendapat porsi 123 miliar dan 96 miliar. “Riset prioritas ini juga sebagian juga membantu Riskesnas. Karena ini merupakan hasil pertemuan *multilateral meeting* antara Kemenkes, Bappenas, dan Kemenkeu,” imbuhnya

Selanjutnya, Balitbangkes juga memunyai riset kajian yang diberikan di masing-masing pusat. Balitbangkes sendiri mempunyai empat pusat dan satu sekretariat, yakni Puslitbang Biomedik dan Teknologi Dasar Kesehatan, Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Humaniora dan Manajemen Kesehatan. “Kajian kita beri masing-masing 500 juta per pusat. Mereka akan melakukan riset dan kajian, dan yang paling baru kita ada riset pembinaan teknologi kedokteran, yakni tugasnya melakukan pembinaan unit-unit lembaga litbang kedokteran. Itu saja menghabiskan dana 200-250 juta/riset,” jelasnya.

Lalu ada riset kajian kompetitif untuk mendukung semangat para peneliti Balitbangkes yang bersaing dengan hasil-hasil penelitian yang sifatnya untuk kompetitif, Balitbangkes sengaja menganggarkan itu sebesar 14 miliar. Selanjutnya, Balitbangkes menyediakan dana cadangan untuk riset yang pasti akan digunakan setiap tahunnya, dana ini mereka beri nama Riset Kontijensi yang dicadangkan sebesar 1 miliar.

“Riset ini gunanya jika ada hal yang di luar dugaan, misalnya KLB (Kejadian Luar Biasa) atau kebakaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, itu *kan* kejadian yang di luar rancangan kita. Kita berikan pada Sekretariat, nanti masing-masing pusat jika berkepentingan dengan riset yang sesuai mengajukan anggaran ke Sekretariat, karena kita kan Kementerian Kesehatan ya, harus siap dan siaga jika kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Tapi selama ini setiap tahun selalu ada,” selorohnya.

Saat ditanya, apakah selama ini dirasa cukup anggaran sebesar itu dengan program yang juga sangat banyak, Ma’ruf berkata “Secara anggaran global, kita meningkat terus tiap tahun. Tapi kalau pelaksanaan, jadinya tidak murni sebesar itu anggarannya karena ada alasan efisiensi pemerintah. Namun sejauh ini, anggaran lebih dari cukup,” kata Ma’ruf sambil tersenyum. (IFR)



SATUAN BIAYA KELUARAN, SIAPKAH?

Anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia yang selama ini masih sangat minim dan tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, menjadi salah satu alasan lemahnya hasil-hasil penelitian dalam negeri. Selain itu, masalah lain yang tidak kalah penting ialah, peneliti Indonesia masih disibukkan dengan urusan administrasi, sehingga terkesan tidak fokus pada hasil penelitian yang seharusnya menjadi elemen kemajuan bangsa. Lantas apa langkah pemerintah? Dan bagaimana peran Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) dalam permasalahan ini?

Medio Juli 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun Anggaran 2017. PMK tersebut bermaksud memberikan 'angin segar' kepada para peneliti Indonesia, karena mengatur mengenai SBK yang berlaku untuk Sub Keluaran penelitian.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) menyatakan, PMK tersebut merupakan wujud sinergi antarkeementerian dan lembaga di Indonesia dengan terobosan besar yang mengu-

bah *mindset* penelitian yang selama ini berfokus pada urusan administratif, khususnya bagi dunia penelitian yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) dan perguruan tinggi.

Melalui PMK ini, diharapkan peneliti tidak perlu pusing memikirkan masalah laporan administrasi penelitian. Sebab, pertanggungjawaban kegiatan penelitian dan pengembangan, pengkajian teknologi, serta inovasi akan lebih sederhana, namun tetap akuntabel.

"Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan menteri yang sangat ditunggu sekian puluh tahun. Peneliti bisa melakukan riset yang

tidak dibebani administrasi. Fokus saja pada penelitiannya," ungkap Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek dan Dikti, Muhammad Dimiyati.

Harus Konsisten

Namun, penelitian yang menggunakan dana SBK ini memang tidaklah mudah. Bagi K/L yang ingin mengajukan anggaran melalui SBK, harus konsisten dengan apa yang dari awal diajukan dalam proposal penelitian.

Endang Taryono, Kepala Bagian Penganggaran Setditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti mengatakan, SBK memanglah berbasis *output*, namun harus lebih fokus dan konsisten. Artinya, jika mengajukan penelitian, maka penelitiannya bersifat *multi years* (tahun jamak).

"Misal saya mau menciptakan A, ya harus meneliti A sampai kapan pun. Di kami itu syarat riset minimal berjalan 3 tahun, dan berbasis *multi years*. Kalau hanya satu tahun ya tidak bisa. Itulah risiko penelitian," jelasnya saat kami jumpai di ruangnya.

Untuk itu, beberapa K/L yang penelitiannya bervariasi, atau fokus di bidang sosial humaniora, kebanyakan mengaku belum siap menggunakan SBK.

Seperti yang terjadi di BPP Kemendagri, menurut Mohammad Noval, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, pola SBK perlu disinergikan dengan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terutama setelah melihat adanya beberapa perbedaan dalam pendefinisian kegiatan dan jenis *output* sebagaimana yang ada dalam PMK 106 tahun 2016.

"Dalam waktu dekat, kami akan bersurat ke Kementerian Keuangan terkait hal ini," paparnya.

Sementara itu, menurut Endang Taryono, sebenarnya penelitian yang berbasis sosial-humaniora bisa saja membutuhkan waktu penelitian yang cukup lama dan lebih dari tiga tahun, hanya saja komponen yang berkaitan mampu berargumentasi atau memberi-

kan justifikasi yang kuat dan relevan saat mengajukan SBK.

"Setiap tahun *kan* kita ada penjaminan mutu, mereka *lah* yang akan menilai proposal itu layak atau hanya mendapatkan sekian persen, kalau tidak bisa mencapai penilaian, ya sudah tahun depan anggarannya dipotong," kata Endang.

Dinilai oleh komite

Seperti yang sudah disinggung di atas, untuk mendapatkan dana tambahan melalui SBK, K/L harus menyimak betul Pasal 5 Ayat (1) dalam PMK tersebut, di aturan baru itu menyatakan, dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran penelitian didasarkan pada hasil penilaian tim komite dan *reviewer*.

Pada ayat tersebut disebutkan, pedoman pembentukan komite penilaian dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang masing-masing. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Sehingga dari *reviewer* dan komite penilaian tersebut keluarlah hasil keputusan apakah K/L itu mendapatkan dana SBK dengan *grade A* (100 persen), *grade B* (75 persen), atau *grade C* (50 persen). "Ya tidak semua dana diberikan *lah*, nanti kita akan lihat apakah penelitian ini masuk akal atau tidak. Komite dan *reviewer* yang ditunjuk oleh masing-masing K/L yang bersangkutan nanti yang menilai. Tapi ingat, komite dan *reviewer* harus orang yang berbeda. *Nah* setelah itu, kami nantinya akan menciptakan penjaminan mutu, yang akan mengevaluasi secara keseluruhan setiap tahunnya," papar Endang.

Namun, saat menyambangi tiga BPP Kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. Masing-masing dari mereka mengaku belum siap menggunakan SBK dengan berbagai pertimbangan dan alasan.



Seperti yang terjadi di Kementerian Perdagangan, saat tim Media BPP menemui **Septo Soepriyatno**, Kasubag Anggaran BPPP (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan). Ia mengatakan anggaran yang dirumuskan dalam SBK terlalu kecil dan tidak sesuai dengan penelitian di Kemendag yang sudah dalam taraf penelitian terapan. "Dalam SBK, anggaran penelitian ke luar negeri saja mendapat anggaran 650 juta, sementara anggaran penelitian kita lebih dari itu. Karena sistem penelitian kita bukan hanya sekadar buku laporan hasil penelitian, tapi sudah taraf penelitian terapan yang hasilnya menjadi rekomendasi ke pemerintah," paparnya.

Meski begitu, Septo mengaku telah banyak bertanya dan mencari informasi lebih detail mengenai SBK kepada pihak Kemenristek.

"Saya sempat berbincang dengan orang Kemenristek, saat saya bertanya mengapa anggaran itu begitu kecil, mereka *sih* katanya sudah mengajukan dana yang besar, hanya saja yang keluar dari Kemenkeu tidak sesuai dengan apa yang diajukan Kemenristek. Selain itu, penilaian pengajuan juga sesuai dengan komite dan *reviewer*, dan itu bukan dari orang sama. Kalau begitu, tidak bisa *dong*. Bagaimana mungkin orang yang berbeda menilai, sementara tidak mengikuti perkembangan dari awal proposal itu dirancang, *kan* aneh. Mereka juga sempat bilang ke saya, katanya kami bisa saja mengajukan lebih dari anggaran yang telah

ditetapkan dari SBK, tapi dengan justifikasi yang kuat," cerita Septo.

Namun sayangnya, justifikasi yang kuat itu seolah terpatahkan oleh Pasal 3 Poin (a) dalam PMK tersebut yang menyatakan, dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai batas tertinggi yang **besarannya tidak dapat dilampaui** dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L Tahun Anggaran 2017.

"Ya jadi tidak bisa diajukan lebih besar lagi, semua harus berpacu pada apa yang dianggarkan SBK. Itulah sebabnya, kami akan rapat internal terlebih dahulu, dan sepertinya kami tetap menggunakan apa yang telah kami rancang (tidak menggunakan SBK-*red*)," jelasnya.

Hal itu juga dirasakan oleh **Nirmala Ahmad Ma'ruf**, Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi Litbang Kementerian Kesehatan. Saat kami menyambangi kantornya di bilangan Jl. Percetakan Negara, Ma'ruf mengatakan dengan tegas tidak menggunakan anggaran SBK untuk program penelitian 2017.

"Range kita sangat jauh, kita riset nasional saja rata-rata bisa menghabiskan 100 miliar, kalau dipaketkan dengan *output* kita, tentu sangat jauh dengan *range* SBK yang hanya Rp. 300 juta," jelasnya.

Selain itu, hasil-hasil penelitian yang

dicanangkan dalam SBK dirasa tidak sesuai dengan apa yang ada di Kemenkes. "SBK ini *output*-nya HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan jurnal ilmiah. Kemenkes berbeda, litbang kami ada karena mendukung lembaga tertentu. Kita ini kiblatnya pada program, sesuai dengan kebutuhan program dan kebutuhan Kemenkes. Jadi kegiatan litbang SBK tidak sesuai dengan kami," papar Makruf.

Masih Taraf Evaluasi

Lantas apakah ada sanksi jika K/L terkait tidak menerapkan PMK tersebut? Saat ditanya hal tersebut, Kemenristek melalui Endang mengatakan belum tahu bagaimana perjalanan peraturan ini ke depannya. "Kita lagi buat pedoman terlebih dahulu, diusahakan tahun ini selesai. Mungkin sanksinya pemangkasan anggaran saja bila K/L tidak menggunakan SBK," terangnya.

Karena memang SBK ini adalah anggaran yang diprioritaskan untuk 2017, dan perencanaannya dilakukan H-1 (satu tahun sebelumnya), maka selama perjalanan penerapan SBK tahun anggaran 2017 ini akan ditinjau terlebih dahulu bagaimana respons para peneliti setelah menggunakan SBK, efektif atau tidak. "Ini *kan* baru PMK, masih di bawah Perpres atau Perppu yang kekuatan hukumnya fleksibel dan lemah. Kalau memang di lapangan nanti kita evaluasi ada kegagalan, mungkin dosen atau peneliti tidak siap, atau bagaimana, mungkin saja PMK ini diubah atau dihapuskan," terangnya.

Meski begitu, pihaknya tetap optimis dengan diberlakukannya SBK tersebut, dia berharap penelitian di Indonesia bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya melalui SBK. "Tahun ini saja kita sudah menerima 11 ribu proposal penelitian, nanti akan kita pilih mana-mana saja yang terbaik. Selain itu, tahun ini kita punya 15 jenis penelitian, mulai dari penelitian dasar sampai terapan, *yah* diharapkan dengan adanya SBK ini gairah peneliti Indonesia semakin meningkat," tutupnya. (IFR)

LAPORAN UTAMA



ANGGARAN MINIMAL DUNIA PENELITIAN INDONESIA

Rendahnya dana penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi penyebab utama tertinggalnya riset Indonesia dibanding negara-negara lain.

Saat ini, rasio belanja litbang nasional hanya 0,09 persen dari PDB. Padahal, rasio anggaran litbang yang memadai menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), sebesar dua persen dari PDB. Di Indonesia sendiri, untuk mencapai angka 0,09 persen harus didapatkan dengan susah payah.

Sebagai perbandingan, Malaysia tel-

ah melangkah cukup jauh bahkan sebelum 2015 yang mencapai satu persen dan Singapura 2,1 persen dari PDB. Begitu juga dengan negara-negara anggota BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang sudah melebihi satu persen.

Data tersebut menunjukkan, anggaran riset Indonesia belum membaik dari tahun ke tahun. Bahkan, sepanjang 2016 telah terjadi dua kali efisiensi dengan pemotongan anggaran.

Saat ini, dunia riset Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah tidak hanya dari segi pendanaan, tetapi juga dari segi kebijakan. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain mengatakan, dari total 1,182 triliun anggaran LIPI pada 2016, hanya sekitar 30 persen yang digunakan untuk kegiatan penelitian. Padahal, untuk meningkatkan perkembangan dan peningkatan daya saing bangsa, penguasaan iptek dan inovasi, dukungan anggaran mutlak diperlukan.

"Riset merupakan pendongkrak ekonomi jangka panjang, walaupun tidak secara langsung dan cepat dapat dirasakan manfaatnya. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan, perlu usaha jangka panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, riset hingga saat ini masih belum dilihat sebagai investasi," ujar Iskandar

Negara-negara dengan sumber daya alam melimpah, kebanyakan tidak

menikmati nilai tambah yang besar. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kemampuan negara tersebut dalam mengembangkan iptek maupun inovasi. Swiss, adalah salah satu contoh negara yang ditopang dengan iptek dan inovasi, keterbatasan SDA tidak menjadi penghalang Swiss untuk berinovasi.

Menurut laporan *World Intellectual Property Index* (WIPO), PBB, menobatkan Swiss sebagai pemimpin dunia di bidang inovasi. Kenyataan tersebut didapat setelah WIPO melakukan penilaian kepada 141 negara melalui 84 indikator. Swiss menempati posisi teratas, sementara Swedia dan Singapura, berada di peringkat kedua dan ketiga. Swiss juga dinilai sangat baik di bidang penelitian dan pengembangan, *output* kreatif, dan kelestarian ekologi.

Swiss berperan dalam meningkatkan kerja sama karir para peneliti muda internasional. Baru-baru ini, lembaga sains nasional Swiss memfasilitasi anggaran sebesar satu miliar dolar untuk peneliti muda di dunia, termasuk para peneliti dari Indonesia. Swiss pun sudah memiliki kerja sama pendidikan jangka panjang dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.

Harapan besar tentu dilimpahkan kepada pemerintah, untuk lebih memperkuat komitmen dan perhatian terhadap dunia penelitian. "Kami juga berharap terbatasnya anggaran dan perhatian terhadap riset tidak melemahkan semangat para peneliti Indonesia untuk terus berkontribusi menghasilkan yang terbaik bagi negara ini lewat penelitian," terang Iskandar.

Pendanaan riset

Dana riset memang minim, pemangkasan anggaran bukanlah sekadar wacana. Pemerintah yang mengurus riset pun harus sigap dan gesit melakukan cara, agar dana riset yang sudah minim tersebut tidak terkena imbas pemangkasan.

Anggaran dana riset 2016 sebesar Rp 1,5 triliun, dipastikan tidak terkena imbas pemangkasan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) Muhammad Nasir. Dalam hal pendanaan, Kemenristek dan Dikti juga telah menggandeng sejumlah industri. Pendanaan diberikan kepada beberapa bidang

riset, seperti bidang pangan dan pertanian, dengan harapan Indonesia kembali dapat merasakan swasembada pangan. Pendanaan riset juga diberikan dalam bidang obat-obatan dan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi.

Selain dana yang berjumlah Rp 1,5 triliun tersebut, Menristek dan Dikti juga mengatakan adanya penambahan dana riset dari kementerian/lembaga lain sebesar enam triliun, yang berasal dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) seperti LIPI dan Badan Tenaga Atom Nasional.

Dengan dana riset yang tersedia, harapan besar pemerintah tertuju pada sektor energi terbarukan (*renewable energy*). Peneliti diharapkan dapat melakukan lebih banyak riset yang ditunjukkan untuk mengerakan dan mencari sumber energi baru terbarukan. Pasalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil atau yang berasal dari alam. Selain lebih efisien, produk energi terbarukan juga lebih



kompetitif di pasaran. Sehingga dapat memberikan efek *multiplier* untuk membanjir ekonomi Indonesia.

Untuk menuju hal demikian, tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah dibutuhkan standarisasi inovasi lokal. Standarisasi tersebut perlu dipermudah oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Karena, melalui standarisasi, inovasi akan dirasakan secara konkret oleh masyarakat, inventor dan inovator itu sendiri.

"Ini yang disebut hilirisasi inovasi atau komersialisasi inovasi. Saat inovasi akan diproduksi massal, di situ standar berperan agar proses produksinya efisien atau *low cost*, namun keamanan serta kualitasnya terjamin," kata Nasir.

Terobosan baru dibidang riset

Dalam bidang penelitian, Kemen-

ristek dan Dikti memunyai sejumlah terobosan baru, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

Terobosan tersebut terkait perubahan tata kelola keuangan riset. Peraturan tersebut mempermudah peneliti dalam hal administrasi, yang selama ini peneliti kerap direpotkan dengan laporan riset berbasis aktivitas penelitian, kini peneliti bisa lebih fokus pada hasil penelitian.

Dalam hal pendanaan, peneliti juga akan diberikan anggaran penelitian secara bertahap. pengucuran dana akan dilaksanakan melalui dua tahap. Alokasi pertama sebesar 70 persen diberikan di awal untuk memenuhi kebutuhan material penelitian. Sisa, 30 persen, diberikan setelah ada laporan hasil riset yang telah ada lolos evaluasi. Ketika hasil evaluasi menemukan ketidaksesuaian, tidak menutup kemungkinan alokasi dana 70 persen yang sudah dikucurkan harus dikembalikan. Hal itu guna mengefisienkan anggaran riset agar tepat sasaran.

Reformasi regulasi

Untuk mendukung dunia riset, pemerintah juga telah melakukan reformasi regulasi sebagai cita-cita menuju era emas riset Indonesia 2017. Beberapa regulasi, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010, telah diusulkan Kemenristek dan Dikti untuk direvisi supaya penelitian bisa berjalan secara *multiyears* atau berkelanjutan. Selain itu, konsep Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) pun sudah mendapat persetujuan dan menuju pengajuan Perpres.

Kemenristek dan Dikti pun optimis target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara nomor dua dengan jumlah publikasi ilmiah terbesar di Asia tenggara pada 2019 bisa tercapai. Saat ini, posisi Indonesia masih berada pada urutan empat di ASEAN setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"Jumlah publikasi kita sekarang baru sekitar enam ribu, sedangkan Thailand saja sudah 12 ribu. Dengan adanya kemudahan administrasi dan reformasi regulasi, kita bisa jadi nomor satu," pungkas Nasir. (msr/diolah dari berbagai sumber)

JEPRET



TAKSI PERAHU melintas di bawah Jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan. Selain bis perahu, taksi perahu menjadi salah satu andalan masyarakat Sumsel, sebagai alat transportasi yang menghubungkan Palembang dengan beberapa daerah di Provinsi Sumsel.

JALAN PERUBAHAN BANGSA MEMBAIKNYA PERINGKAT INOVASI INDONESIA

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran lima persen dalam dua tahun terakhir. Peringkat kemudahan berbisnis juga membaik dari peringkat 120 ke peringkat 109. Namun indeks daya saing Indonesia cenderung stagnan, bahkan ada tanda-tanda memburuk.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen)



*Data merupakan pertumbuhan on the year

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia

(Indeks dihitung dari 184 (negara + sejumlah kota))



Daya saing Indonesia melemah dari peringkat 34 pada periode 2014-2015, ke peringkat 37 pada periode 2015-2016. Sementara Singapura berada di peringkat kedua terbaik di dunia. Korea Selatan dan Thailand juga jauh di atas Indonesia.

- Indonesia masih membukukan pertumbuhan 4,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Singapura (2,0 persen), Thailand (2,8 persen), dan bahkan Korea Selatan (2,6 persen).
- Ada dua hal yang membuat Indonesia bertahan dari kemerosotan ekonomi. Pertama, **inovasi yang dilakukan pemerintah**. Kedua, perubahan paradigma kekuasaan daerah yang membuat kepala daerah menempuh jalan **deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik**.

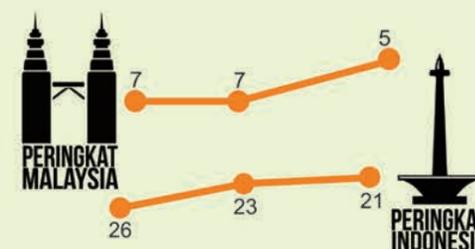
Peringkat Indonesia dalam The Global Competitiveness Index

Indeks dihitung dari 41 negara



Indeks Investasi Infrastruktur Global

Indeks dihitung dari 41 negara



Indeks Inovasi Indonesia

Indeks dihitung dari 128 negara



Indeks Inovasi dalam Kualitas Regulasi

Indeks dihitung dari 128 negara



Indeks Inovasi dalam Aturan Hukum

Indeks dihitung dari 128 negara



INOVASI

- Inovasi dan deregulasi hukum cukup mendorong peringkat inovasi Indonesia secara keseluruhan.
- Dalam Indeks Inovasi Dunia, posisi Indonesia naik delapan peringkat ke level 88, dari 97 pada 2015.
- Jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan, inovasi yang dilakukan Indonesia masih terlalu sempit dan tertinggal.
- Negara dengan indeks pengeluaran yang tinggi untuk penelitian dan pengembangan, cenderung punya daya saing yang kuat di pasar dunia.
- Korea Selatan adalah negara peringkat pertama dunia dalam indeks pengeluaran untuk penelitian dan pengembangannya.
- Indonesia berada di posisi ke-105 dari 108 negara dengan indeks pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.

Bangun negeri dengan berinovasi

BPP Kabupaten Kutai Kartanegara

MENINGKATKAN KAPASITAS MELALUI PENDEKATAN SOSIAL

Sejak keluarnya Peraturan Bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2012, istilah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menjadi primadona yang terus digaungkan, program tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintahan, pemda, lembaga kelibangan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Namun, bagi BPP Daerah sebagai koordinator penguatan SIDa, pelaksanaan program tersebut dianggap masih jauh dari harapan. Beberapa pernyataan terlontar dari para pemimpin BPP Daerah yang ditemui Media BPP, baik itu dari BPP Riau, BPP Sumatera Selatan, BPP Sumatera Barat, dan yang belum lama ditemui adalah BPP Kutai Kartanegara (Kukar).

Sekretaris BPP Kukar M. Bisyrin, misalnya, yang ditemui Media BPP pada awal Agustus 2016, program SIDa yang digagas oleh Kemenristek Dikti dan Kemendagri belum sepenuhnya bisa diaplikasikan oleh BPP yang ada di daerah. Penguatan SIDa terkesan *jomplang*, malah pihak Kemendagri terbilang kalah inisiatif dibanding Kemenristek Dikti. Akibatnya banyak BPP yang ada di daerah hanya sekadar nama dan miskin fungsi.

“Harusnya kita sudah *take off*. Faktanya, kita kalah inisiatif dalam mengaplikasikan SIDa. Saat ini justru banyak program dan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti yang muncul. Sementara dari Kemendagri sendiri seperti hidup segan mati pun *ogah*,” ujar Bisyrin.

Konotasi negatif lembaga kelibangan pun semakin tidak terbendung. Litbang yang identik dengan lembaga yang sulit berkembang seakan men-

SEJUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(SKPD) tidak terkecuali lembaga penunjang seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah terus berpacu dengan waktu menentunkan setiap program yang siap dieksekusi pada tahun anggaran yang sudah direncanakan.

Program-program unggulan pun dibentuk sedemikian rupa. Upaya memperbesar alokasi anggaran dari APBD dilakukan, tetapi realisasi dan serapannya tidak sesuai yang diharapkan.

jadi jargon baru bagi eksistensi BPP di mana pun. Untuk meredam istilah tersebut, BPP Kukar membuat solusi dengan tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dan menghasilkan banyak manfaat. Istilah negatif BPP pun perlahan hilang dan tidak lagi melekat pada BPP Kukar. Pasalnya, saat ini reputasi BPP Kukar semakin baik di mata pemerintah dan masyarakat. Bagi BPP Kukar,

minimnya anggaran tidak menjadi sebuah persoalan. Mereka tetap mengedepankan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung serta memiliki dampak yang luas bagi keberlangsungan hidup setiap orang.

Sejak dua tahun terakhir, BPP Kukar cukup diperhitungkan *stakeholder* pemerintah. Keberadaannya selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Bahkan, tidak jarang BPP Kukar secara langsung terlibat dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Kukar.

Sebagai contoh, pascaruntuhnya jembatan Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kukar secara lisan meminta langsung kepada BPP Kukar, untuk melakukan kajian pembangunan kembali jembatan kebanggaan Kota Tenggarong tersebut. Selain itu, permintaan juga datang dari beberapa SKPD terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Kukar, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Hairil Anwar Kepala BPP Kukar, pihaknya juga terus meningkatkan sinergitas sesama SKPD dan *stakeholder* Pemerintah Kukar. Ia juga rutin melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga negara seperti Ba-



dan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan pihak ketiga seperti akademisi dalam beberapa program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Kukar.

“Selain kerja sama, strategi kunci meredam istilah negatif lembaga kelibangan, yaitu dengan meningkatkan peran masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara maksimal dalam setiap kajian serta dalam menghasilkan setiap program kegiatan yang dilaksanakan,” jelas Hairil.

Masyarakat sumber informasi

Agar BPP Kukar tidak lagi miskin fungsi, dan justru semakin dibutuhkan, program kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat. Beberapa cara yang ditempuh adalah dengan mewajibkan setiap bidang dalam struktur BPP Kukar untuk terjun dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, program kegiatan diharapkan akan menghasilkan *outcome* dan berdampak.

Dengan program bermanfaat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar pun tidak segan menunjuk BPP Kukar melakukan kajian pembangunan jembatan sebagai penghubung beberapa wilayah terisolasi. Hal tersebut dimaklumkan. Mengingat, luas wilayah sekitar 27.263 kilometer persegi, Kabupaten Kukar memiliki daerah perairan seluas

4.097 kilometer persegi.

Jembatan penghubung diharapkan dapat meminimalisasi biaya dan waktu tempuh perjalanan menuju ke setiap ujung wilayah Kabupaten Kukar, khususnya memudahkan pemerintah ketika berkunjung ke setiap pertambangan.

“Dengan jembatan akan membuka daerah terisolasi, sebelum jembatan jadi, waktu tempuh antardesa sangat jauh. Bisa ditempuh 2 malam 3 hari, biaya transport juga mahal di atas 5 juta, karena harus memakai perahu,” ucap Hairil.

Salah satu contoh program kegiatan yang melibatkan peran masyarakat adalah ketika BPP Kukar mencari solusi banjir di Tenggarong. Informasi awalnya didapatkan dari masyarakat. Menurut Hairil hal demikian karena BPP Kukar rajin melakukan jemput bola ke masyarakat.

Penyebab banjir kemudian ditelusuri dengan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir sebagai informan, penelusuran sejarah kawasan juga dilakukan dengan mendengarkan cerita masyarakat, yang menyebutkan, jauh sebelum pembangunan jembatan beton daerah tersebut tidak pernah terkena banjir.

Kurangnya sumber daya manusia khususnya peneliti yang sesuai dengan kepakarannya menjadi permasalahan uta-

ma BPP Kukar. Untuk kasus tersebut, BPP Kukar kemudian menghasilkan rekomendasi untuk Dinas Pekerjaan Umum. Yang kemudian dilakukan kajian lebih lanjut mengenai anggaran biaya pembangunan gorong-gorong besar untuk memperlancar aliran sungai-sungai kecil. Sehingga banjir pun dapat diminimalisasi bahkan teratasi.

Menurut Hairil dengan jemput bola BPP Kukar dapat mengetahui segala permasalahan masyarakat dari berbagai hal, sehingga bisa dikaji dan direkomendasikan kepada pemerintah dan SKPD.

“Atas hal itulah, setiap program kegiatan dan kajian bukan hanya sekadar *output* saja, keinginan kami sebagai target Pemda Kukar yang harus menghasilkan *outcome*. Jadi, apa pun yang dihasilkan harus bernilai ekonomis, positif dan bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya sekadar laporan admistrasi,” kata Hairil.

BPP Kukar bisa dijadikan sebagai bentuk ideal BPP Daerah sebagai lembaga *think tank*, dan *money follow program*. Kegiatan bermanfaat tidak mesti tergantung dengan anggaran biaya. Tetapi dengan inisiatif menjemput bola yang mengedepankan pendekatan sosial yang lebih konsisten dan intensif. (msr)

BPP KUTAI KARTANEGARA

WAJAH BARU
BPP KUTAI KARTANEGARA

Dua tahun terakhir setelah berganti kepemimpinan, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus memperbaiki kualitas. Sentuhan tangan dingin sejak berganti pemimpin, mampu memoles BPP Kukar menjadi lembaga yang layak diperhitungkan oleh stakeholder pemerintah Kabupaten Kukar.

Barat Lembuswana yang hanya sebuah mitos yang dikenal luas masyarakat Kutai Kukar. Keberadaannya secara nyata diragukan sebagian orang. Dari sisi eksistensi sebuah lembaga, BPP tidak jauh berbeda dengan mitos tersebut. Sebagai lembaga penunjang kemampuan BPP Kukar tentu diragukan bahkan tidak jarang dipandang sebelah mata oleh *stakeholder* pemerintah.

Tetapi, mitologi tidak hanya menghadirkan cerita mitos belaka. Sebuah mitos memiliki fungsi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, salah satunya untuk merangsang perkembangan kreativitas dalam berpikir. Untuk itu, melalui program kegiatan yang sudah dilakukan, BPP Kukar menjadi pendorong inovasi bagi perkembangan daerah.

Beranjak dari jargon negatif BPP yang melekat selama ini sebagai lembaga yang sulit berkembang, wacana menghidupkan kembali BPP Kukar semakin gencar. *tagline* 'the new look BPP Daerah. We will give you a smart solution' diciptakan sebagai visi baru. *Tagline* tersebut diharapkan dapat membangkitkan BPP Kukar, sebagai titik balik kejayaan Kukar pada masa lampau. Visi mulia terse-



but juga sebagai momentum kelahiran kembali (*reborn*) dengan semangat baru menjadi lembaga yang kaya manfaat.

Menurut Sekretaris BPP Kukar M Bisyrton, *tagline* tersebut bukanlah sebuah mimpi yang berlebihan. Konsep tersebut didasarkan pada kondisi BPP Kukar yang masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Atas dasar itulah, menurut Bisyrton, dalam dua tahun terakhir program kegiatan yang diusung diharapkan memiliki dampak di masa depan.

"Kita sadari bahwa masih banyak kelemahan yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, dalam dua tahun terakhir kita mencoba masukan program kegiatan penunjang tetapi penting di masa depan," tutur Bisyrton.

Rencana Membangun OJS

Jurnal ilmiah yang berkualitas bukan hanya penting untuk masa depan. Jurnal yang dikelola dengan baik akan memiliki pengaruh yang luas bagi keberlangsungan lembaga tempat bernaung para peneliti. Jika kenyataannya seperti itu, maka kegiatan pengelolaan dan wacana membangun *Open Journal System* (OJS), tidak patut dikatakan sekadar penunjang, tetapi lebih dari itu.

Selain peneliti, jurnal ilmiah merupakan dua hal penting yang melekat pada setiap BPP. Jurnal terakreditasi dan terindeks di lembaga pengindeks internasional, dapat mengangkat reputasi jurnal, peneliti dan meningkatkan kapasitas lembaga pengelola jurnal itu sendiri.

Wacana membangun OJS merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Di tengah banyaknya BPP yang mengembangkan program kajian yang justru tidak sesuai dengan komoditas andalan daerahnya. Sementara produk kelitbangan dan peneliti sebagai ruh BPP sama sekali tidak terpikirkan.

Beberapa tahun terakhir jurnal milik BPP Kukar sulit terakreditasi. Masalahnya tidak sampai di situ, peraturan baru LIPI mewajibkan akreditasi saat ini harus dengan sistem *daring*. Sementara keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Baik dari segi pengelolaan maupun anggaran yang disiapkan.

Jurnal Gerbang Etam yang dikelola saat ini masih jauh dari harapan. Dikatakan Mutiara Kartika salah seorang pegelora, masalah utama Jurnal Gerbang Etam adalah sulitnya menerima artikel ketika hendak terbit. Di samping itu, kualitas artikel juga terbilang

sederhana dan belum sesuai standar baku penulisan jurnal ilmiah, sementara kuantitas artikel setiap terbitan berbanding terbalik dengan kuantitas peneliti yang tersedia, yang hanya berjumlah tiga orang saja.

"Status belum terakreditasi juga menjadi pertimbangan para peneliti untuk mengirimkan artikel, karena angka kredit seakan kebutuhan mendesak untuk didapatkan," begitulah dikatakan Mutiara ketika Tim Media BPP mengunjungi BPP Kukar awal Agustus silam.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, beberapa upaya pun dilakukan demi mendorong keberlangsungan jurnal ilmiah. BPP Kukar pun mewajibkan setiap hasil kajian dan hasil penelitian dibuat artikel, serta secara rutin melakukan program kegiatan standar penulisan karya ilmiah.

WAJAH BARU BUKAN BERARTI ASING DAN KETINGGALAN ZAMAN. WAJAH BARU BERARTI SEBUAH FASE KELAHIRAN KEMBALI UNTUK MERAH CITA-CITA DENGAN TIDAK MENGULANGI HAL YANG SAMA. NAMA LEMBAGA BOLEH HILANG DAN BERGANTI, TETAPI KARYA TIDAK BOLEH HILANG, NAMUN HARUS TETAP ADA DAN TERUS BERTRANSFORMASI.

Proses menuju OJS, dilakukan jauh-jauh hari. Beberapa persiapan pun dilakukan, di antaranya melakukan pelatihan pengelolaan OJS. Keseriusan juga ditunjukkan dengan menganggarkan pembangunan OJS pada tahun anggaran mendatang.

"Membangun OJS adalah kebutuhan mendesak, program kegiatan yang lebih penting akan didahulukan, yang terpenting adalah bagaimana jurnal agar terakreditasi, maka harus ada rumahnya dulu. Jurnal terakreditasi sangat penting untuk meningkatkan angka kredit peneliti," kata Bisyrton.

Selanjutnya, BPP Kukar secara intens akan terus berkomunikasi dengan pengelola Jurnal Bina Praja (BPP Kemendagri), terkait pengelolaan secara teknis dan belajar terkait apa saja yang harus dipersiapkan dalam membangun OJS.

Mengawal Perda OPD

Wajah baru BPP Kukar juga dibuktikan dengan ditunjuknya BPP Kukar sebagai Tim penyusun Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keterlibatan menjadi sebuah moment berharga dan kesempatan penting yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh BPP Kukar untuk menjadikan BPP Kukar semakin mendapat posisi di mata stakeholder. Perda OPD sendiri mengatur terkait struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi semua SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kukar.

Dengan ditunjuknya sebagai Tim Penyusun, diharapkan, tidak ada lagi tupoksi ganda antara BPP Kukar dengan SKPD. Menurut Hairil, selama ini masih banyak kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan digunakan oleh SKPD lain, seperti FGD, pengkajian, survei, bahkan penelitian. Sehingga sebagai lembaga riset, eksistensi BPP semakin kerdil.

Contoh konkretnya adalah ketika BPP Kukar melakukan kajian terhadap pembangunan gedung baru. Kesepakatan yang sudah dibuat bersama BPPT, harus dibatalkan karena kajian sudah diambil alih oleh salah satu SKPD. Padahal kajian BPP Kukar lebih rinci dan tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran. Program kajian pun seakan menjadi kegiatan yang sia-sia.

Lebih lanjut, menurut Hairil, sebagai Tim Penyusun, pihaknya akan terus mengawal Penyusunan perda OPD secara maksimal. Dengan harapan tidak ada lagi duplikasi kegiatan. "Dengan duplikasi kegiatan, akan menghasilkan beban pekerjaan yang besar pula. Selain akan menghabiskan banyak waktu, juga akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, bagaimana caranya agar kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan hanya satu tugas yaitu dibebankan kepada BPP Kukar," katanya.

Wajah baru bukan berarti asing dan ketinggalan zaman. Wajah baru berarti sebuah fase kelahiran kembali untuk meraih cita-cita dengan tidak mengulangi hal yang sama. Menjadi lembaga ideal memang sulit. Pepatah mengatakan, seberapa besar pun upaya menjadikan besar, suatu saat kebesaran bisa saja hilang. Nama Lembaga boleh hilang dan berganti, tetapi karya tidak boleh hilang, namun harus tetap ada dan terus bertransformasi. (msr)

Pembinaan Jurnal BPP Daerah



diminta untuk datang secara langsung ke daerah, atau mereka datang ke sini, terkait pengelolaan jurnal ilmiah," ucap Ilham.

Lebih lanjut kata Ilham, sebuah lembaga yang mengatasnamakan dirinya *research and development*, tidak akan terlepas dari dua hal, yakni keberadaan peneliti dan produk penelitian. Seseorang tidak bisa dikatakan

peneliti jika tidak memiliki hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah.

"Ibarat seorang penyanyi, tidak bisa dikatakan penyanyi jika tidak memiliki album atau *single*, sama halnya ketika seorang peneliti tidak punya hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Kalau kita mau berkaca pada LIPI, maka yang dikenal adalah produk jurnal dan para peneliti mereka, sering muncul di televisi dan jadi pembicara di mana-mana," kata Ilham.

Pembinaan jurnal daerah

Pada Juni dan Agustus 2016 pengelola JBP diundang secara khusus oleh BPP Daerah Kabupaten Sragen dan BPP Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Undangan tersebut sebagai permintaan untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan jurnal ilmiah mereka.

Berlakunya sistem akreditasi jurnal secara *online* per April 2016, tidak serta-merta membuat semua pengelola jurnal berbangga hati. Di sisi lain, banyak yang merasa kesulitan karena harus bermigrasi ke dalam sistem *online*. Terlebih, masih banyaknya pengelolaan jurnal secara konvensional atau cetak yang belum baik bahkan belum lama berdiri. Tentu saja, istilah-istilah baru seperti *Open Journal System* (OJS), DOAJ, DOI, dan sebagainya yang terdapat dalam jurnal *online* terasa asing bagi mereka. Sementara tuntutan untuk terbit dalam versi *online* tidak bisa dimungkiri, karena sebuah jurnal terakreditasi begitu penting bagi peneliti.

Keberhasilan JBP yang berpindah dari cetak menuju *online* sejak awal 2016, menjadikan JBP sebagai salah satu jurnal yang dire-

Tidak hanya itu, JBP juga menjadi kiblat bagi para pengelola jurnal yang baru berdiri di daerah, khususnya para pengelola jurnal milik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tidak jarang beberapa pengelola jurnal BPP Daerah meminta pengelola JBP untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap jurnal mereka.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh pengelola JBP yang melakukan pembinaan kepada beberapa pengelola jurnal BPP Daerah. Di antara BPP Daerah tersebut adalah Badan Litbang dan Diklat Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Juni lalu, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur pada awal Agustus ini.

Selain pembinaan yang dilakukan secara langsung ke daerah, pengelola JBP juga menerima beberapa tamu yang datang dari daerah terkait hal yang sama, di antaranya dari BPP Daerah Pelalawan, Riau, BPP Daerah Kota Pontianak, dan BPP Daerah Kabupaten Siantar, Sumatera Utara, dan lain sebagainya.

Menurut Managing Editor JBP Moh. Ilham A Hamudy, JBP membuka secara lebar bagi siapa pun dan berasal dari manapun pengelola jurnal yang ingin berkonsultasi terkait pengelolaan jurnal ilmiah. Pembinaan yang dilakukan selama ini juga merupakan salah satu komitmen BPP Kemendagri sebagai pembina semua BPP yang ada di daerah.

"Pembinaan terhadap BPP Daerah adalah salah satu kewajiban BPP Kemendagri selaku lembaga yang menaungi BPP Daerah. Dan kami tidak akan segan-segan jika seandainya

JURNAL BINA PRAJA (JBP) MILIK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI, SAAT INI TENGAH MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENJADI JURNAL BEREPUTASI INTERNASIONAL. SALAH SATU CARA YANG DITEMPUH ADALAH DENGAN MENDAFTARKANNYA PADA LEMBAGA PENGINDEKS BEREPUTASI SEPERTI MENDELEY, CROSEFF DAN DOAJ.

komendasikan LIPI kepada beberapa daerah. Atas dasar itulah, beberapa pengelola jurnal daerah mengundang pengelola JBP untuk melakukan pelatihan secara langsung terkait pengelolaan jurnal ilmiah secara *online*.

Dalam setiap perjalanan ke daerah, pembinaan yang dilakukan oleh pengelola JBP, tidak hanya diikuti oleh internal BPP Daerah tersebut. Tetapi banyak dari eksternal BPP sendiri yang turut hadir sebagai peserta. Di BPP Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, para peserta datang dari berbagai instansi pemerintahan seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Diskominfo, dan beberapa SKPD. Selain itu, turut hadir juga peserta dari Universitas Mulawarman.

Di setiap daerah yang dikunjungi, setiap peserta begitu antusias mengikuti acara, diskusi berjalan sangat seru, bahkan para peserta masih menginginkan penambahan waktu agar mereka lebih intens berdiskusi terkait pengelolaan jurnal secara teknis.

Tentu banyak harapan yang datang dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari Kepala BPP Daerah. Hairil Anwar, Kepala BPP Daerah Kukar berharap agar BPP Kemendagri terus melakukan pembinaan pengelolaan jurnal. Sebagai *follow up* kegiatan tersebut, pada tahun yang akan datang, BPP Daerah Kukar akan menganggarkan untuk membangun OJS, sebagai bentuk komitmen memberdayakan BPP Kukar dan peneliti.

Sekretaris BPP Kukar M. Bisyrton mengatakan hal yang sama, keberadaan jurnal ilmiah secara *online* sangat penting dan mendesak, karena selain wadah aktualisasi peneliti, keberadaan jurnal terakreditasi juga akan bermanfaat.

"Bermanfaat tidak hanya untuk peneliti di lingkungan kita, tetapi juga di luar. Karena untuk menaikkan angka kredit, kalau dengan *online*, karya tulis dan hasil penelitian juga akan dinikmati oleh banyak orang sampai seluruh Indonesia bahkan dunia," tutur Bisyrton. (msr)



Semarak 17 Agustus Kementerian Dalam Negeri

JAKARTA – Memperingati 71 Indonesia Merdeka, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan berbagai macam acara dan perlombaan. Setidaknya ada 15 perlombaan yang diadakan Kemendagri, yakni Bulu Tangkis, Tenis Meja, Volley, Futsal, Gaple, Tarik Tambang, Panjat Pinang, Karya Tulis, Jalan Sehat, Lomba Tumpeng, Poco-poco, makan kerupuk, Bakiak, Joget Balon, dan Balap Karung.

Perlombaan tersebut diramaikan oleh 12 komponen Kemendagri, tidak terkecuali BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri yang berhasil memborong 4 kejuaraan sekaligus, yakni juara 3 Badminton,

juara 3 Volley, juara 4 Gaple, dan Juara 1 dan 2 Lomba Karya Tulis.

Acara semarak Kemerdekaan RI tersebut dirayakan sejak 8-17 Agustus 2016. Seluruh peserta begitu antusias mengirimkan berbagai atlet dari masing-masing komponen. Babak penyisihan Futsal diselenggarakan di kantor BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kalibata Jakarta Selatan, dengan menyisakan peserta dari IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) memasuki babak final, dan keluar IPDN sebagai juaranya. Peserta dari IPDN juga berhasil menjadi juara 1 lomba Volley melawan tuan rumah BPSDM



yang keluar sebagai juara II.

Sementara lomba Badminton dimenangkan oleh Setjen (Sekretariat Jenderal) melawan Ditjen Keuda (Keuangan Daerah) yang keluar sebagai juara II. Pertandingan Badminton berlangsung seru, masing-masing



komponen melawan tiga partai sekaligus yakni dua ganda putra dan satu ganda campuran bertepatan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara.

Selama hampir satu minggu pertandingan olahraga berjalan, disusul kemudian pada 16 Agustus, bertepatan di Kantor Pusat Kemendagri, seluruh komponen hadir dalam acara jalan sehat di halaman Monumen Nasional. Bagaikan lautan manusia, seluruh pegawai kompak mengenakan pakaian olahraga berwarna merah mengikuti jalan sehat dari kantor pusat ke Tugu Monas diiringi berbagai atraksi *marching band* dari IPDN. "Setelah jalan sehat ini, ada serangkaian lomba, yakni lomba balap karung, lomba bakiak, lomba tarik tambang, ketoprak humor, dan berbagai *doorprizes*," kata pembawa acara.

Setelah selesai jalan sehat, seluruh peserta kembali ke kantor pusat untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan dan hidangan yang tersedia secara gratis. Mulai dari soto mie, sate padang, lontong, dan aneka *snack*. Seluruh peserta antusias merayakan semarak kemerdekaan.



Pertunjukan Ketoprak

Di tengah kesemarakan lomba dan pembagian 40 *doorprizes*, Kementerian Dalam Negeri menghadirkan pertunjukan ketoprak humor dengan cerita "Ande-ande Lumut". Salah satu pemeran hadir dari BPP Kemendagri, yakni Kapus Adwil dan Kependudukan Subiyono, serta Kapus Inovasi Daerah Rochayati Basra.

Dalam penampilan tersebut Rochayati bertindak sebagai orang tua dari para kelenteng. Sementara Subiyono bertindak sebagai Yuyu Kangkang. Penampilan begitu menarik dan menghibur para penonton. Tidak jarang penonton yang masih ingin menyaksikan acara ketoprak humor tersebut. Acara tersebut juga semakin meriah dengan dipandu oleh pelawak terkenal Tarzan, dan salah satu pegawai Kemendagri yang berperan sebagai Klenting Merah Muda dengan atribut gemulai dan payudara buatan dari balon air. Semua peserta yang hadir turut tertawa terpingkal-pingkal dengan polahnya. "Saya kelinting Independen pak," canda Kelinting Merah Muda.



Beri Penghargaan

Keesokan harinya, pada 17 Agustus, seluruh komponen Kementerian Dalam Negeri mengadakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Pada upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 juga dihadiri oleh para pejabat daerah. Mulai dari Lurah, Camat, hingga Kepala Daerah. Mereka menerima piagam penghargaan karena berhasil melakukan inovasi. Salah satunya diberikan kepada Kecamatan Kota Lama, Kupang, NTT.

Tjahjo berpesan kepada para kepala daerah khususnya para camat dan kepala desa yang hadir agar tetap bekerja dan menjaga stabilitas daerah, dan melayani masyarakat. "Makna 71 tahun kita harus bekerja. Hari ini kita masih mendapat amanah. Saya tidak tahu kapan saya mati, di mana pun kita menjabat itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga memberikan penghargaan pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendagri yang telah memberikan kontribusi luar biasa secara jujur, disiplin, dan mengabdikan secara konsisten selama 30, 20, dan 10 tahun. Penghargaan itu bernama Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan Perpres No 25/TK/Tahun 2016. Salah satunya adalah Soemarsono Direktorat Jenderal OTDA Kemendagri, Dodi Riyadmadji Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Edi Samsudin Nasution dari Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Yuniar Setya Ningrum. (IFR)

**PENELITI
DITANTANG
MENULIS CERITA
PERUBAHAN**

Riuh diskusi semakin terdengar kala pemateri menyampaikan cara yang paling sederhana ketika menulis cerita perubahan.

Beberapa menit kemudian, para peserta mulai hangat, berdiskusi dengan nyaman, mengkritisi, mengoreksi dan memberikan saran. Berdiri dan memperkenalkan diri, adalah hal awal yang dilakukan masing-masing peserta untuk memulai pelajaran. Tidak terkecuali perwakilan dari BPP Kemendagri yang bertindak sebagai tamu undangan pada siang itu.

Acara itu digagas oleh lembaga donor, Knowledge Sector Initiative (KSI) bersama SOLIDARITAS dengan tema "klinik cerita perubahan." Dalam acara tersebut setiap peserta dibekali cara menulis yang menarik dan populer. Penyelenggara menawarkan kepada mitra-mitra KSI untuk menuliskan Cerita Perubahan (CP). Mereka berharap para peserta nantinya dapat menulis dan mendokumentasikan perubahan yang ada dalam organisasi tempatnya bernaung.

Selain dari BPP Kemendagri yang diwakili oleh Kepala Subag Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi, Moh. Ilham A Hamudy dan Peneliti BPP Kemendagri Heryandi Roni. Turut hadir juga beberapa perwakilan dari lembaga-lembaga seperti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) UIN Jakarta, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Materi disampaikan oleh Mark



Fiorello dari SOLIDARITAS. Mark adalah spesialis pengembangan desain evaluasi, manajemen data dan manajemen sistem, dan juga menjabat sebagai Direktur SOLIDARITAS. Selain Mark, materi disampaikan oleh peneliti dan spesialis komunikasi SOLIDARITAS Dwi Joko Widiyanto.

Menurut Mark Fiorello, tujuan diadakannya "klinik" tersebut, untuk memberikan kesempatan bagi mitra-mitra yang ingin menulis CP. Peserta juga diberikan sarana untuk melakukan konsultasi mengenai pendekatan dalam mengembangkan tulisan yang sesuai dengan tema yang dicari KSI.

"Dari acara ini setiap peserta nantinya memiliki *outline* CP yang bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu narasi CP sepanjang 500 - 1500 kata," kata Mark.

Sepanjang acara, peserta dibimbing secara intens. Para peserta tidak segan untuk bertanya dan para penyelenggara juga tidak segan untuk membantu. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menganalisis beberapa contoh cerita perubahan

orang lain. Dan kemudian didiskusikan kelemahan dan kelebihan CP tersebut.

Pemateri juga mengajarkan cara membuat *lead* tulisan yang baik. Menurut Dwi Joko, sebuah *lead* tulisan harus sangat tajam menyampaikan topik utama dan membuat penasaran. "Lead harus ibarat anak panah yang akan menembus ke hati pembaca. Lead juga sebagai faktor utama yang akan membuat pembaca suka," ucap Dwi, ketika menyampaikan materi, di Gedung KSI, yang berlokasi di Ratu Plaza, Jalan Jendral Soedirman Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Dwi, sebuah tulisan harus membuat pembaca belum tahu menjadi tahu, dan tidak membuat bingung pembaca yang sudah tahu. Hingga sore hari, acara berjalan sangat kondusif karena peserta dibatasi hanya 14 orang.

Rencana tulisan dari setiap peserta akan dibukukan terkumpul akan diterbitkan dalam sebuah buku. Selain itu, penyelenggara memberikan batas waktu kepada para peserta selama satu bulan, hingga 16 September tahun ini. (msr)

DENYUT WISATA

KUTAI KARTANEGARA

Keramaian seakan hidup di setiap sudut Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sepanjang jalan K.H Ahmad Muksin berderet hotel dan penginapan yang berhadapan langsung dengan Sungai Mahakam. Ketika liuknya melintasi Tenggarong, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur itu, kini tidak lagi menyeramkan. Spot-spot wisata diciptakan dan Tenggarong semakin ramai dengan hiruk pikuk wisatawan.

Sepanjang mata memandang, rimba dan hutan tropis menjadi teman sepanjang perjalanan. Menuju Kota Tenggarong dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama hampir lima jam dari Sepinggang, Balikpapan. Tiga jam menuju Samarinda, kemudian dilanjutkan kembali menuju Kutai Kartanegara. Biaya transportasi pun terbilang mahal, kocek yang harus dikeluarkan sekira 135 ribu rupiah per orang untuk tiba di Samarinda, belum lagi menuju Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Sesampainya di Samarinda, gemericik hujan yang terjun dari langit, memental di atap mobil lalu mendarat di aspal hitam. Hujan berubah kabut, dari dalam mobil, benda berwujud menjadi tidak kasat mata. Kalimantan Timur, daerah dengan hutan di sepanjang mata memandang. Udara masih begitu terasa alami, saat senja angin mendayu-dayu dan dingin pun mulai sayu.

Kutai Kartanegara adalah wilayah yang bergantung pada potensi unggulan daerah berupa sumber daya alam melimpah dan pertanian. Dengan program Gerbang Raja-nya (Gera-

kan Pembangunan Rakyat Sejahtera), Kutai Kartanegara mulai melakukan transformasi struktur ekonomi dari sumber daya alam yang tidak terbaru menjadi terbaru. Kutai Kartanegara sangat bergantung pada hasil tambang dan minyak bumi. Namun, harga minyak dunia yang fluktuatif, membuat Kutai Kartanegara kerap mengalami defisit, karena semua bergantung pada harga pasar minyak bumi dan tambang. Seperti yang disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kepada **Tempo** beberapa waktu lalu.

“Terus terang saat ini Kutai Kartanegara sedang defisit. Solusinya adalah mencari skala prioritas sehingga program yang dijalankan pun lebih efektif dan lebih efisien,” kata Rita dalam wawancara khususnya.

Kabupaten Kutai Kartanegara sejak lima tahun terakhir di masa kepemimpinan Rita Widyasari mulai menyiapkan beberapa tempat wisata baru. Meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kutai Kartanegara menjadikan geliat wisata di Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong mengalami kemajuan, bahkan meningkat tajam. Sarana dan prasarana modern pun disiapkan, Namun, dengan tidak menghilangkan budaya lokal dan adat

istiadat setempat.

Beberapa tempat wisata andalan Kutai Kartanegara di Tenggarong, misalnya, Museum Besar Mulawarman, Museum Kayu, Jembatan Repo-repo, Pulau Kumala, dan beberapa taman-taman di sepanjang Mahakam yang kami kunjungi awal Agustus lalu.

Museum Mulawarman

Dua orang kawan yaitu Ijat dan Agus. Mereka adalah orang Kutai Kartanegara yang diberi tugas menemani perjalanan kami siap menjadi pemandu. Ijat membawa sedan merah melaju menapaki aspal hitam pekat menyusuri Jalan Wolter Monginsidi, kemudian berbelok menuju Jalan KH. Ahmad Muksin hingga tiba di Museum Mulawarman. Mengadopsi arsitektur tradisional Suku Dayak, bangunan putih berdiri kokoh menghadap sungai besar. Pilar-pilar putih dan jendela-jendela besar berbaris rapi memanjang. Dari kejauhan, tampak seperti istana tempat singgah kepala negara.

Museum Mulawarman, pada mulanya merupakan istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada 1963 oleh pemerintah Belanda. Letaknya tepat di ujung kota Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada saat itu. Museum ini kemudian diresmikan pada 25 November 1971 oleh Gubernur Abdoel Wahab Sjahrani.

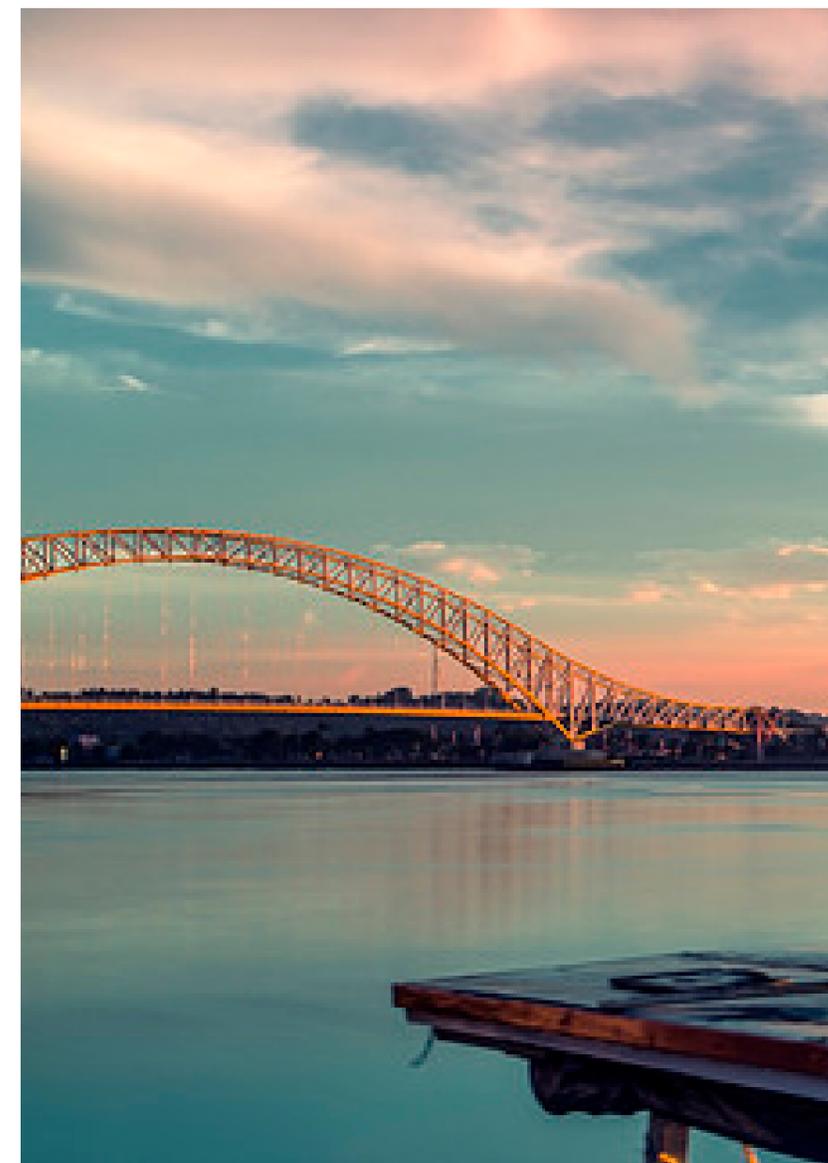
Melihat lebih dekat, bahan bangunan didominasi oleh beton mulai dari ruang bawah tanah, lantai, dinding, penyekat hingga atap. Di halaman Museum terdapat duplikat patung Lembuswana yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara.

Museum Mulawarman memiliki dua lantai. Di lantai bawah terdapat koleksi keramik yang berasal dari Cina. Sedangkan, pada lantai satu berisi koleksi peninggalan kerajaan dan peninggalan bercorak kesenian. Di dalamnya juga tersimpan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan seni yang tinggi yang pernah digunakan oleh kesultanan.

Memasuki pintu utama, singgasana sultan yang dilengkapi payung, umbul-umbul, dan peraduan pengantin Kutai Keraton menjadi daya tarik utama dan masih tetap terjaga.

Menurut informasi singgasana tersebut digunakan oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sultan Aji Muhammad Parikesit, dan raja-raja Kerajaan Kutai sebelumnya.

MENINGKATNYA WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KUTAI KARTANEGARA MENJADIKAN GELIAT WISATA DI KUTAI KARTANEGARA, KHUSUSNYA DI KOTA Tenggarong mengalami kemajuan, bahkan meningkat tajam. SARANA DAN PRASARANA MODERN PUN DISIAPKAN, NAMUN, DENGAN TIDAK MENGHILANGKAN BUDAYA LOKAL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT.





Selain itu terdapat Ketopong, mahkota Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas. Beratnya 1,98 kilogram. Menurut Ijat ketopong tersebut adalah replika dari aslinya yang sudah di simpan di Museum Nasional Jakarta. Ijat juga mengantarkan kami menunjukkan sisa peninggalan lainnya. Adalah Kalung Ciwa, peninggalan sejarah Kerajaan Kutai yang ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. "Penemuan terjadi pada 1890 oleh seorang penduduk di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman. Kalung Ciwa sendiri hingga saat ini masih digunakan sebagai perhiasan kerajaan dan dipakai oleh sultan saat ada pesta penobatan sultan baru," ujar Ijat.

Selain itu, sisa peninggalan lain adalah Kalung Uncal, kalung emas seberat 170 gram yang dihiasi liontin ber relief cerita Ramayana. Terdapat juga Kura-Kura Emas, benda unik ini ditemukan di daerah Long Lalang, daerah yang terletak di hulu sungai Mahakam. Kemudian pedang Sultan Kutai terbuat dari emas padat. Keris Bukit Kang adalah keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karang Melenu, permaisuri Raja Kutai Kartanegara yang pertama. Dan yang menarik lainnya adalah keberadaan gamelan-gamelan yang diyakini berasal dari Pulau Jawa. Tidak hanya itu, beberapa topeng, keris, pangkon, wayang kulit, serta barang-barang kuningan dan perak yang ada sebagai

peninggalan sejarah kerajaan kutai tempo silam juga membuktikan, telah ada hubungan erat antara kerajaan-kerajaan di Jawa dengan Kerajaan Kutai Kartanegara.

Saat ini, meski pun di hari-hari biasa, Museum ini cukup ramai dikunjungi. Pengunjung tidak hanya datang dari Kutai Kartanegara tetapi dari daerah lain di Indonesia. Selain menarik, faktor lain adalah murahahnya harga tiket masuk. Dengan harga Rp 4 ribu rupiah untuk dewasa dan Rp 2 ribu upiah untuk anak-anak, pengunjung sudah bisa belajar mengenai sejarah Kutai Kartanegara. Namun sangat disayangkan, Museum ini tidak menyediakan pemandu yang bisa menjelaskan lebih detail sejarah Kutai Kartanegara. Kami hanya mengandalkan keterangan yang ada di setiap benda peninggalan dan informasi yang diutarakan agas ijat tentunya.

Museum Kayu

Setelah Museum Mulawarman, kami bergegas menuju Museum Kayu Tuah Himba yang berjarak sekira tiga kilometer dari pusat kota Tenggarong. Orang mengenalnya sebagai Museum Kayu.

Rumah-rumah adat Kutai yang berbahan dasar kulit kayu menyambut kami ketika turun dari kendaraan. Dari depan, rumah panggung berukuran 20x20 meter persegi tersebut tidak tampak seperti museum. Namun seperti rumah biasa dengan pekarangan asri dan tidak terlalu luas.

Untuk masuk ke Museum Kayu setiap pengunjung dikenakan Rp 7 ribu rupiah. Di pintu utama Lembuswana menyambut perkasa. Masuk lebih dalam, aroma kayu yang dolesi oli tekas pun mulai terasa. Bagi yang pertama berkunjung, orang akan terheran, Mu-



seum Kayu mengoleksi binatang. Dan itulah yang menjadikan museum tersebut terasa unik.

Museum Kayu menyimpan seekor buaya muara yang telah diawetkan. Menurut Ijat buaya sepanjang enam meter ini telah menelan dua orang korban. Buaya ganas ini terdapat di bagian tengah museum. Ijat juga menerangkan kenapa disebut Museum Kayu Tuah Himba.

"Dulu buaya ini memakan penduduk. Sementara kata 'Tuah himba' diambil dari semboyan Kota Tenggarong, 'Tuah Himba Untung Langgong' yang berarti menjaga kekayaan hutan dan alam, maka manfaat yang diperoleh akan langgeng (lancar)," terangnya.

Museum Kayu menyimpan keragaman flora dengan produk yang dihasilkan di Pulau Borneo. Terdapat 220 jenis kayu perdagangan. Di antara kayu-kayu yang menjadi koleksi museum ini adalah kayu ulin yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan.

Di ruang yang lain, terdapat koleksi berupa berbagai jenis daun yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Selain itu, di ruang ini, juga terdapat fosil kayu yang telah berumur ratusan tahun dan telah berubah menjadi batu.

Beda lagi dengan koleksi yang tersimpan di Ruang Ukiran. Di ruang ini, terdapat ukiran-ukiran kayu khas Kalimantan. Patung khas Dayak Kenyah, Rumah Betang, atau rumah panjang khas Dayak berukuran mini ikut melengkapi kerajinan yang tersusun rapi di sudut-sudut ruang.

Koleksi lain di Museum Kayu adalah lempengan kayu kapur dengan diameter 60 centimeter. Di alam, pohon ini mampu tumbuh hingga ketinggian mencapai 60 meter. Kayu ini biasa digunakan sebagai pondasi bangunan.

Ruang yang lain dikhususkan untuk

menyimpan berbagai kerajinan berbahan dasar rotan. Kerajinan yang menjadi koleksi di ruang ini seperti perabotan rumah, lampu taman, kursi, hingga rotan sebagai bahan dasar pembuat aneka kerajinan tersebut.

Jembatan Repo-repo dan Pulau Kumala

Jembatan Repo-repo berada di pusat Kota Tenggarong sebagai penghubung menuju Pulau Kumala. Repo-repo merupakan konsep unik dalam upaya memancing kehadiran wisatawan berkunjung ke Pulau Kumala. Kata repo berasal dari Bahasa Kutai yang artinya 'gembok'. Maka tidak jarang ketika menaiki jembatan tersebut akan ditemukan banyak gembok. Jembatan tersebut menjadi daya tarik dan unik lantaran *view*nya yang indah tepat di atas sungai Mahakam, Repo-repo memiliki panjang 230 meter, lebar 3,5 meter dan tinggi dari permukaan air pasang sekira delapan meter dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.

"Dahulu mengunjungi Pulau Kumala yang berada di tengah Sungai Mahakam hanya bisa menggunakan perahu (*kelotok*). Ketergantungan terhadap satu akses ini cukup merepotkan, contohnya pada saat arus deras melanda sungai Mahakam. Hal ini mengakibatkan pengunjung turun drastis. Sebelumnya di Pulau Kumala, pernah ada kereta gantung mirip di Taman Mini Indonesia Indah," ucap Ijat.

Desain jembatan tersebut konon memadukan unsur tiga jembatan terkenal di dunia yakni Golden Gate di San Fransisco, Jembatan Banpo di Korea Selatan, serta Jembatan Sungai Seine di Perancis. Keberadaan jembatan tersebut sangat dinanti oleh masyarakat, terlihat dari animo pengunjung pada siang itu. Untuk melintasi jembatan ini sekaligus masuk ke obyek wisata Pulau Kumala, pengunjung wajib membeli tiket seharga Rp 7 ribu rupiah (dewasa) dan Rp 5 ribu rupiah (anak-anak).

Napas Pariwisata Kutai Kartanegara

Objek wisata di Tenggarong bukan sekadar tempat menikmati keindahan alam dan karya seni. Melainkan juga tempat menyaksikan sejarah Kutai dihidupkan terus menerus. Setiap tahun, misalnya, dilaksanakan Upacara Erau, yaitu tarian Khas Kedaton Upacara Adat dan Mengulur Naga di Desa Kutai Lama.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, yang aliran sungainya membentang di sepanjang kota Tenggarong, kaya akan peninggalan kerajaan Kutai peradaban masa lampau. Di Pulau Kumala juga dibuat sebuah patung Lembuswana berbahan perunggu dengan tinggi sekira 13 meter dan berat 29 Ton dengan 27 orang seniman patung yang berkolaborasi membuat patung lembuswana tersebut.

Konsep pengembangan wisata menjadi salah satu program Gerbang Raja yang digagas Bupati Kutai Kartanegara. Dengan program pesona wisatanya juga, Pemerintah Kutai Kartanegara mendapat penghargaan The Best Achiever Regent kategori Bupati Terbaik dalam penghargaan Men's Obsession Award 2015.

Objek berbasis wisata alam disiapkan di Pulau Kumala, yang menarik untuk dinikmati. Rasakan sensasi menyebrang menggunakan perahu, atau sekadar berjalan kaki melalui jembatan Repo-repo, serta melihat dari dekat kehidupan beraneka fauna.

Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara, masih kepada Tempo mengatakan pihaknya akan terus membangun destinasi wisata baru, khususnya di Pulau Kumala yang akan segera dibangun pusat wisata religi.

"Kami akan mempersilakan setiap agama membangun tempat ibadahnya di sana, sehingga kerukunan pun tetap terwujud," ucap Rita. (msr)



PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA BPP DAERAH

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi penyiapan pedoman penyusunan struktur organisasi perangkat pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pedoman perangkat daerah yang bersifat lintas urusan dipercayakan pada Kementerian Dalam Negeri, salah satunya adalah BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan).

Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Ditjen Otda (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah) di Hotel Mercure, Ancol pada (5/8), Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri berpesan agar secepatnya seluruh komponen menyusun data dan membuat SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) yang baru.

Lebih lanjut, Ditjen Otda melalui Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Aparatur Daerah menggelar rapat dalam rangka fasilitasi penyusunan nomenklatur perangkat daerah yang melibatkan perwakilan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Mohammad Noval yang berfokus pada urusan Penelitian dan Pengembangan di Daerah. "Kita sudah menyipkan

yang baru seperti yang diamanatkan PP OPD. Hal pertama yang kita lakukan adalah penyamaan nomenklatur BPP Daerah menjadi Balitbangda (Badan Litbang Daerah). Jadi tidak ada lagi yang namanya bervariasi seperti gado-gado. Semua harus bernama Balitbangda," tegas Noval.

Selain itu, ada uji kelembagaan yang dilakukan BPP Kemendagri terhadap Balitbangda, yang pada intinya akan ada fungsi serta struktur baru. "Setiap Balitbangda harus memunyai Sub Bidang yang melaksanakan fungsi pengkajian peraturan dan inovasi, baik itu Balitbangda tipe A, B, maupun C. Karena Sub Bidang tersebut mampu mendorong peran maksimal Balitbangda yang nantinya akan membantu membuat naskah akademik, dan bukan hanya sekadar penelitian atau rekomendasi dasar semata," jelasnya

Dengan begitu, Noval berharap Balitbangda bisa bertugas secara maksimal sebagai fungsi pendukung pemerintahan daerah, serta membantu secara teknis pemerintahan daerah dengan betul-betul melalui hasil penelitian dan kajiannya, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan, perkerjasama, penerapan dan pengoperasian melalui aktivitas yang nyata di lapangan.

Struktur Organisasi Tata Kerja

Namun sayangnya, adanya PP OPD juga beriringan dengan efisiensi dan perampingan SOTK. Ada beberapa Balitbangda yang dirumponkan dengan Bappeda atas perampingan struktur.

"Sebenarnya itu anggapan yang keliru, karena Balitbangda bisa masuk dalam semua sektor dan menyatukan ke seluruh kegiatan kelitbang yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Badan Litbang bukan tempat orang-orang buangan, SDM nya harus

berkualitas, yang tidak hanya merujuk pada fungsi penelitian dan pengembangan, tapi juga perkerjasama dan analisis kebijakan, serta evaluasi kebijakan," paparnya.

Untuk itu, BPP Kemendagri menghimbau kepada Balitbangda untuk membuat struktur organisasi yang benar dan berpacu pada fungsional penelitian, pengembangan, perkerjasama, analisis kebijakan, evaluasi kebijakan serta fungsi lainnya. Untuk membantu penyusunan SOTK yang baru, BPP Kemendagri juga sudah merumponkan bagaimana struktur organisasi yang benar untuk Balitbangda Provinsi, Kabupaten/Kota.

Balitbangda Tipe A

Adapun usulan struktur rumusan Balitbangda Provinsi, Kabupaten/Kota bertipe A terdiri 1 Sekretariat dan 4 Bidang, yakni Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Inovasi dan Teknologi.

Sekretariat Balitbangda tipe A tersebut memimpin 3 Subbag, di antaranya Subbag Program dan Kerja Sama, Subbag Keuangan, serta Subbag Umum dan Kepegawaian. Sementara Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan memimpin 3 Subbid. Yakni Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan, Subbid Pemerintahan Desa, dan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan.

Lalu Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari 3 Subbid, yaitu Subbid Sosial dan Budaya, Subbid Kependudukan, dan Subbid Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya pada Bidang Ekonomi Pembangunan terdiri dari



Subbid Ekonomi, Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

Terakhir, Bidang Inovasi dan Teknologi juga terdiri dari 3 Subbid, yakni Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dan Subbid Diseminasi Kelitbang.

Balitbangda Tipe B

Sementara itu, untuk Balitbangda tipe B dapat menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang. Di antaranya Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Bidang Inovasi dan Teknologi.

Sekretariat memimpin 2 bagian, yakni Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian. Sementara itu Bidang Sosial dan Pemerintahan memimpin 3 Subbid, di antaranya Subbid Sosial dan Budaya, Subbid Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, juga memimpin 3 Subbid, di antaranya Subbid Ekonomi, Subbid SDA dan Lingkungan Hidup, serta Subbid Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasana. Lalu di Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari 3 Subbid, yakni Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dan Subbid Diseminasi Kelitbang.

Balitbangda Tipe C

Sementara itu, Balitbangda tipe C hanya terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Bidang, yakni Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, serta Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

UNTUK MEMBANTU PENYUSUNAN SOTK YANG BARU, BPP KEMENDAGRI JUGA SUDAH MERUMUSKAN BAGAIMANA STRUKTUR ORGANISASI YANG BENAR UNTUK BALITBANGDA PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA

Sekretariat Balitbangda tipe C, memimpin sama seperti Sekretariat Balitbangda tipe B. Sementara Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan memimpin 3 Subbid, yaitu Subbid Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Subbid Ekonomi, dan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Sementara Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi memimpin Subbid SDA (Sumber Daya Alam) dan Lingkungan Hidup, Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, serta Subbid Inovasi dan Teknologi.

Digabungkan dengan BAPPEDA

Dalam hal tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bergabung pada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, mendapatkan 2 bidang dengan 3 subbid, yakni Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, memimpin Subbid Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Subbid Ekonomi, dan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum.

Sementara itu Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari Subbid Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, dan Subbid Inovasi dan Teknologi. "Ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing bidang dan subbidang mengikuti tugas dan fungsi bidang serta subbidang sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Balitbangda tipe C," terang Noval.

Noval juga mengingatkan, apabila pembentukan Bappeda diarahkan tidak menggunakan pola maksimal yang berdampak pada pengurangan jumlah subbidang, maka penggabungan fungsi subbidang yang dihapus agar dirumponkan dalam subbidang lainnya dengan tetap berada pada bidang yang sama.

Sementara untuk Balitbangda yang dirumponkan dengan BAPPEDA dengan 1 bidang, terdiri dari 3 subbid yang merupakan penyederhanaan dari Balitbangda tipe B. Yakni Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas Subbid Sosial dan Pemerintahan, Subbid Ekonomi dan Pembangunan, dan Subbid Inovasi dan Teknologi.

Lalu ada juga Balitbangda yang dirumponkan dengan BAPPEDA dengan 1 bidang, dan 2 subbid yang merupakan penyederhanaan dari Balitbangda tipe C, yakni Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas: Subbid Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, dan Subbid Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. "Pembentukan tersebut, bergantung pada kebijakan Bappeda masing-masing," tutup Noval. (IFR)

71 Tahun Merdeka, Indonesia Bergerak Maju

Setelah 71 tahun kemerdekaan, pembangunan Indonesia menunjukkan perbaikan dari segi ekonomi, sosial, dan politik.

INDEKS NEGARA RENTAN

	2012		2013		2014		2015		2016	
	Nilai	Peringkat								
Indonesia	80,6	63	78,2	76	76,8	82	75	88	74,9	86
Tiongkok	78,3	76	80,9	66	79	68	76,4	83	74,9	86
India	78,0	78	77,5	79	76,9	81	79,4	68	79,6	70
Malaysia	68,5	110	66,1	116	66,2	117	65,9	115	66,1	115
Jepang	43,5	151	36,1	156	36,3	157	36	157	35,1	157
Singapura	35,6	157	34	158	35,9	158	34,4	159	32,9	161

Keterangan: Makin kecil nilai indeks dan makin besar peringkat, semakin tahan negara tersebut menghadapi tekanan yang bisa membuatnya ambruk.

Indeks Negara Rentan selama satu dekade menunjukkan Indonesia perlahan-lahan mampu menghadapi tekanan yang bisa membuatnya ambruk

INDEKS DEMOKRASI 2015

Negara	Peringkat Dunia	Indeks Total
Timor-Leste	44	7,24
Indonesia	49	7,03
Filipina	54	6,84
Malaysia	68	6,43
Singapura	74	6,14
Thailand	98	5,09
Kamboja	113	4,27
Myanmar	114	4,14
Vietnam	128	3,53
Laos	155	2,21

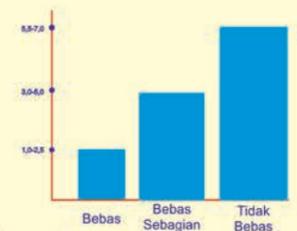
Keterangan: Makin besar angka indeks, makin demokratis sebuah negara. Makin besar angka peringkat, makin tidak demokratis sebuah negara.

Demokrasi Indonesia sudah mengakhiri era pemimpin otoriter, tetapi belum bisa mengakhiri kepentingan-kepentingan lama yang justru berkembang dalam kerangka demokrasi baru di Indonesia (Richard Robison, Guru Besar Emeritus Asia Research Center, Murdoch University, Australia).

PERINGKAT NEGARA BEBAS 2015

No	Negara	Hak-hak Politik	Kemerdekaan Sipil	Status
1	Filipina	3	3	Bebas sebagian
2	Timor-Leste	3	3	Bebas sebagian
3	Indonesia	2	4	Bebas sebagian
4	Singapura	4	4	Bebas sebagian
5	Malaysia	4	4	Bebas sebagian
6	Thailand	6	5	Tidak Bebas
7	Kamboja	6	5	Tidak Bebas
8	Myanmar	6	5	Tidak Bebas
9	Brunei	6	5	Tidak Bebas
10	Vietnam	7	5	Tidak Bebas
11	Laos	7	6	Tidak Bebas

Status Peringkat



Keterangan: Makin kecil skor peringkat, makin bebas sebuah negara. Makin besar sebuah peringkat, makin tidak bebas sebuah negara.

INDEKS PERSEPSI KORUPSI NEGARA ASIA TENGGARA

No	Negara	2012	2013	2014	Skor Indeks 2015	Peringkat*
1	Singapura	87	86	84	85	8
2	Malaysia	49	50	52	50	54
3	Thailand	37	35	38	38	76
4	Indonesia	32	32	36	36	88
5	Filipina	34	36	35	35	95
6	Vietnam	31	31	31	31	112
7	Laos	21	26	25	25	139
8	Myanmar	15	21	22	22	147
9	Kamboja	22	20	21	21	150

Keterangan: Makin tinggi skor indeks dan peringkat, makin baik.

*) Peringkat dunia 2015



Sumber: Litbang Kompas/BIP/SGH/GRH/C12, diolah dari Democracy Index 2015: Democracy in Age of Anxiety, The Economist Intelligence Unit, laman resmi Freedom House (Freedom in the World Country Ratings 1976-2016), laman transparency International, dan laman fsi.fundforpeace.org



Belum lama ini, mungkin sebagian masyarakat dikagetkan dengan salah satu hasil riset yang mengatakan bahwa Bali lebih Islami dari pada masyarakat Aceh atau Padang. Atau masyarakat Bandung yang lebih Islami dari pada masyarakat Makassar? Tentu saja publik merasa dikagetkan dengan hasil penelitian yang bisa jadi dianggap *ngawur* atau tidak mungkin itu. Sebab, semua orang tahu, jika Provinsi Bali mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, bukan Islam.

Kegaduhan seperti itulah yang sempat diciptakan oleh Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute bersama teman-temannya. Fajar yang sempat beberapa kali diundang di acara televisi swasta karena hasil risetnya tersebut, tidak pelak seperti membuat tamparan kepada kelompok Islam garis keras yang bisa jadi sangat 'anti' terhadap Bali, Bandung atau kota-kota yang jauh dari nuansa Islami.

Selama kurang lebih setahun, Fajar dan kawan-kawan melakukan riset di 29 kota seluruh Indonesia. "Awalnya dari obrolan santai, kita memang sangat gelisah sekali dengan pola pikir Islam garis keras. Nah, untuk melawan mereka, kita butuh argumen yang cerdas melalui riset ini," kata pria asal Sukabumi itu, yang MediaBPP temui usai memberikan materi dalam program penelitian Kementerian Agama di Hotel Sofyan, Jakarta.

Dalam kurun tiga bulan, Fajar mengumpulkan data dan riset dengan pendalaman kualitatif dengan metode penilaian yang berbeda, yakni bukan berdasarkan seberapa banyak masyarakat datang ke masjid, beramal, atau menelurkan Perda Syariah, tetapi berdasarkan perilaku Islami yang telah diajarkan Rasul melalui Al-Qur'an dan Sunnah. "Untuk memberikan argumen suatu kelompok, kita harus berpikir seperti kelompok itu. Kita tidak menggunakan metode penilaian *human interest*, HAM atau sebagainya. Kami menggunakan metode syariah Islami. Makanya riset ini sebenarnya cara cerdas untuk membalas argumen, dan kelompok Islam garis keras itu terbukti tidak menyanggah apa yang

FAJAR RIZA UL HAQ

RISET ITU CARA BERDEBAT YANG CERDIK

Direktur Eksekutif Ma'arif Institute

telah kami lakukan," ungkap bapak tiga anak itu.

Fajar sendiri mengaku tidak menyangka, hasil risetnya memberi dampak *gimmick social* yang tinggi di tengah pandangan masyarakat terhadap kehidupan masyarakat Bandung atau Bali yang jauh dari kata Islam dan menjadi kota wisata turis berbagai negara. Lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mengaku, memang sangat senang sekali menggeluti bidang penelitian dan riset sejak duduk di bangku kuliah. Penelitian tersebut bukan hal yang mudah dia lakukan, ada kultur dan kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil untuk menggeluti mengenai Islam dan dunia riset.

Berlatar belakang pesantren

Lahir dan besar di sebuah kota kecil, Sukabumi Jawa Barat anak ke-4 dari 5 bersaudara itu, dibesarkan dari keluarga tidak mampu, hanya beberapa orang dari saudaranya yang mengenyam pendidikan tinggi. Beruntung Fajar salah satunya. Selain itu, sebenarnya Fajar memang tidak ada *background* keluarga yang begitu kental Islamnya seperti menitipkan anaknya di pondok pesantren atau santri. Hanya kakeknya yang kebetulan guru ngaji dan sesepuh di tempatnya dilahirkan. "Kebetulan hanya saya sendiri yang benar-benar dari SD sudah menggeluti Islam ya. Saya SD di Ibtidaiyah yang terkadang harus mondok, lalu SMP di Tsanawiyah juga mondok dan belajar kitab kuning, lanjut ke SMA juga ikut program beasiswa dari Kemenag (Kementerian Agama) di Ciamis yang syarat masuknya harus bisa belajar kitab kuning," ceritanya

sambil mengingat masa lalu.

Syarat untuk memasuki SMA tidaklah mudah. Hanya ada 10 sekolah program beasiswa Islam dari Kemenag di seluruh Indonesia. Madrasah Aliyah berprogram beasiswa itu dulu dikenal dengan sebutan Madrasah Aliyah Kegamaan Khusus (MAKN). "Saya memang dari kecil ingin masuk Madrasah tersebut, makanya dari SD hingga SMP saya masuk sekolah Islam untuk belajar kitab kuning. Di MAKN saya mendapatkan beasiswa *full* serta uang saku Rp.17.000 sebulan. Zaman segitu sudah sangat besar *ya* dulu," imbuhnya.

Di sekolah tersebut, hampir 70 persen Fajar belajar kitab kuning, dan melakukan diskusi dan berdebat dengan kitab kuning. Lulus dari MAKN, Fajar melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengambil Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam. Semasa sekolah, ia juga mondok di sebuah pesantren milik organisasi Muhammadiyah. "Masuk pondok

"Peneliti harus mau belajar berbagai bidang keilmuan, karena riset adalah cara yang digunakan akademisi untuk berdebat secara cerdas"

pesantren tersebut juga tidak mudah, harus ada rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah tempat asal, dan alhamdulillah saya bisa masuk pondok tersebut, sehingga saat kuliah saya dapat beasiswa 50 persen dari pondok tersebut," jelasnya.



Biodata Singkat

Nama : Fajar Riza Ul Haq
Gelar Akademik :

Master of Arts (M.A) Universitas Gajah Mada
Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 1 Februari 1979

Publikasi Buku:

Islam Indonesia Abad ke-21: Kiblat Islam Dunia? dalam Komaruddin Hidayat, Kontroversi Khilafah, Mizan, 2015.

Catatan 1 Dekade MAARIF Institute (Bersama Ahmad Syafii Maarif dkk). Jakarta: MAARIF Institute, 2013.

Pengalaman Sinematografi:

Film Layar Lebar "Mata Tertutup", *Produser Eksekutif* (2012).
Film Layar Lebar "Si Anak Kampung: Berdasarkan Kisah Hidup Ahmad Syafii Maarif," *Produser* (2011).



TOKOH

Selain aktif di pondok pesantren, Fajar juga aktif di organisasi mahasiswa, baik itu organisasi Muhammadiyah maupun organisasi Badan Eksekutif. Karena aktif berorganisasi itulah, Fajar sering melakukan kelompok diskusi dan melakukan penelitian. Pria mungil berbadan kurus itu ingat betul bagaimana penelitian pertamanya sempat dipresentasikan pada ajang nasional. "Waktu itu semester lima ada lomba karya ilmiah mahasiswa di Gorontalo pada 2000, itu forum nasional di organisasi Kementerian Agama. Saat itu saya mewakili provinsi dan penelitian kami yang merancang ada 3 orang. Kami meneliti tentang lokalitas di Solo yang kami benturkan dengan ilmu fiqh. Tentu itu menjadi pro-kontra ya, tapi tidak masalah, itu menjadi pengalaman pribadi saya dan teman-teman untuk tampil mempresentasikan hasil penelitian di forum nasional dari 33 provinsi," katanya.

Dari situ, Fajar semakin giat membentuk kelompok diskusi yang mendalami kajian agama, filsafat dan kebudayaan. Selesai mengenyam S1 pada 2002, Fajar masih berkecimpung di kampusnya. Ia bekerja di Pusat Studi Budaya

dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di situ, ia melakukan penelitian lebih dalam terkait agama. Selama di Pusat Studi Budaya tersebut, Fajar boleh jadi anggota termuda di lingkungan tersebut, teman-teman yang lainnya rata-rata berprofesi sebagai dosen. "Di sana, saya sambil meneruskan S2 saya di UGM. Saya bisa dibilang paling muda, dan hanya mahasiswa biasa," katanya.

Bergabung dengan Ma'arif Institute

Setelah dirasa cukup mendapatkan banyak ilmu dari lembaga yang mengajarkannya banyak hal tersebut, Fajar ditawarkan oleh Direktur Eksekutif Ma'arif Institute pada 2006 untuk menjadi direktur program dan pindah ke Jakarta. Hanya 2 tahun Fajar bekerja di Solo, ia merasa perlu pengalaman dan tantangan yang lebih besar dengan hijrah ke Jakarta. "Jadi karena saya dulu suka menulis di media massa, kebetulan ada yang mengajak saya untuk hijrah ke Ma'arif Institute. Di sana saya jadi direktur program yang membidangi segala macam programnya Ma'arif Institute," paparnya.

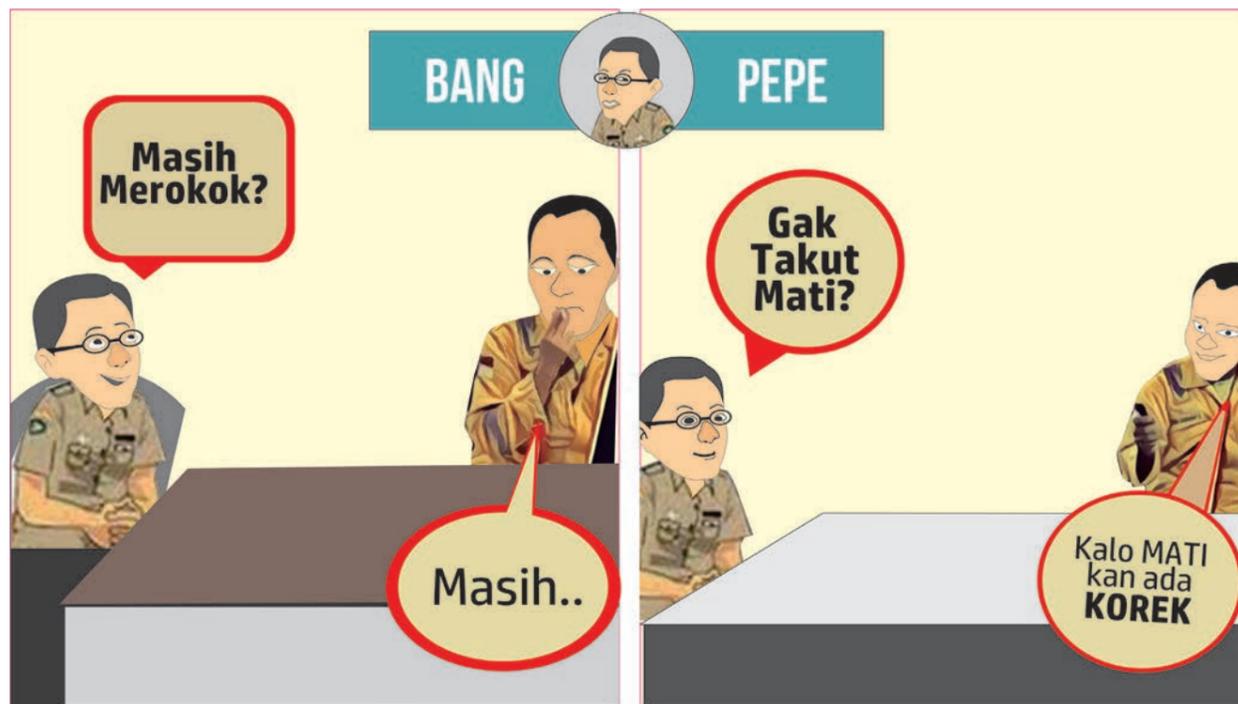
Cukup dalam jangka waktu tiga

tahun, karier Fajar melesat tajam. Pada 2009 ia langsung ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, dan selama di Ma'arif Institute, Fajar juga melakukan pertukaran pelajar dan pelatihan yang diikutinya dari berbagai program beasiswa. Seperti dari Universitas Birmingham (Inggris), Massachusetts Institute of Teknologi (Amerika), dan Universitas Tsinghua (Tiongkok). "Karena tugas saya tidak hanya sebagai peneliti, tetapi juga menjadi direktur yang menggawangi institusi ini, maka saya harus belajar banyak hal tentang itu. Dan saya rasa ini pesan juga untuk para peneliti, untuk selalu merasa haus terhadap ilmu apa pun," ungkapnya.

sebelum mengakhiri perbincangan, Fajar berpesan kepada seluruh peneliti muda, untuk senantiasa terbuka dengan berbagai disiplin ilmu. Ia pun menyarankan agar menggunakan riset sebagai alat berdebat ilmiah yang cerdas.

"Peneliti harus mau belajar berbagai bidang keilmuan, karena riset adalah cara yang digunakan akademisi untuk berdebat secara cerdas," tutupnya. (IFR)

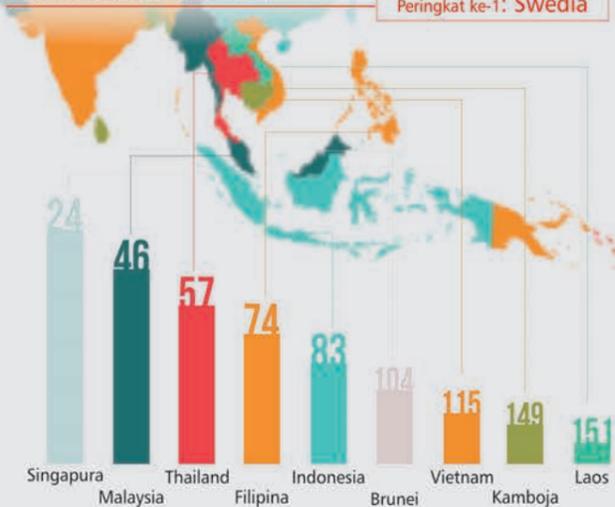
KOMIK



Korupsi & Kontribusi Keilmuan Indonesia



Good Country Index 2015



PERINGKAT INDONESIA BERDASARKAN INDIKATOR



Sumber: goodcountry.org

● Good Country Index 2015 digagas Simon Anholt, guru besar kehormatan dari University of East Anglia di Inggris. Ia juga aktif menjadi penasihat bagi kepala negara dan pemerintahan di puluhan negara dalam hal branding negara.

● Hasil riset menempatkan Indonesia pada peringkat ke-160 dari 163 negara dalam hal sumbangsih di sektor keilmuan dan teknologi bagi umat manusia.

● Buruknya performa Indonesia di sektor keilmuan dan teknologi pada index negara baik, tidak terlepas dari sumbangsih korupsi di bidang pendidikan.

NEGARA TERATAS CPI DAN GPI

Corruption Perception Index 2015	Good Country Index 2015	GCI 2015-Science and Technology
1 Denmark	1 Swedia	Inggris
2 Finlandia	2 Denmark	Austria
3 Swedia	3 Belanda	Ceko
4 Selandia baru	4 Inggris	Denmark
5 Belanda	5 Jerman	Siprus
6 Norwegia	6 Finlandia	Selandia Baru
7 Swiss	7 Kanada	Finlandia
8 Singapura	8 Perancis	Swedia
9 Kanada	9 Austria	Hongaria
10 Jerman	10 Selandia Baru	Swiss
10 Luksemburg	11 Irlandia	Jerman
10 Inggris	12 Swiss	Belgia
88 Indonesia	Indonesia (83)	Indonesia (160)

ASEAN



INFOGRAFIK: RIFKI

Narasi Seorang Petani

Oleh : Hari Taqwan Santoso

“Dulu para petani mengolah nasib sendiri, mau mengangkat cangkul panen dipikul, kalau tidak ya tidak. Sekarang mereka mengadunya dengan keberuntungan. Orang menanam bahan pangan itu sekarang cuma bisa main untung - untungan, meskipun sudah mengerahkan seluruh upaya yang dia bisa,” kata bapakku dengan nada kesal.

Lelaki tua yang dadanya dipenuhi cucuran keringat itu sekarang sedang duduk di teras rumah, melepas lelah setelah tangan - tangan penuh keriputnya capai mengayun cangkul. Bapak ditemani secangkir kopi hitam kental beserta kawan sejak kecilnya, rokok *tingwe*. Duduknya memang tak pernah sepi oleh berbagai macam cerita, tak terkecuali sekarang.

Bapak sedang menceritakan getir yang dirasakannya sebagai penggarap sawah di desaku ini, di era ini. Sebelum sampai pada kalimat yang barusan dia ucapkan, bapak sempat menyinggung begitu mujurnya petani zaman dulu. Orang yang menggarap sawah di desa tahun sembilan puluhan ke bawah itu ibarat raja (ia tidak kenal dengan istilah “Orde Baru”). Apalagi kalau tanahnya milik sendiri. *Wuihhh*, kaya raya! Punya tanah setengah hektar saja, sudah menjadi orang terkenal sedesa. Bahkan tetangga-tetangga desa juga banyak yang tahu.

Aku ingat betul suatu hari ketika usiaku bahkan belum genap sepuluh tahun, lurah sesa sebelah datang ke rumah dalam balutan kain batik rapi. Waktu itu aku hanya tahu kalau bapak sedang punya urusan penting dengan pak lurah desa sebelah. Beberapa tahun setelahnya, aku baru diberi tahu bahwa kedatangan pak lurah adalah untuk menawarkan putri saudaranya. Maksud pak lurah,

supaya bapak menjadikan keponakannya itu istri kedua, tapi bapak tidak mau karena tidak ingin menduakan ibu. Aku tertawa terpingkal - pingkal mendengar cerita itu. Lucu saja. Cerita tersebut membuktikan betapa terhormatnya petani di desaku tahun sembilan puluhan ke bawah.

Tahun-tahun itu juga, kalau musim panen padi tiba para buruh tani yang berdatangan ke rumah. Mereka sama minta izin untuk *derep*, yaitu kerja memanen padi tidak dengan upah uang tapi seperdelapan hasil panen. Selain padi, kerja panen memakai sistem kerja harian, tapi kira-kira situasinya tak jauh berbeda. Ibarat kata orang datang pulang main *kendang*. Sebab bahan makanan waktu itu masih sangat terbatas. Mesin-mesin pertanian belum menjamah desa, tapi petani bisa mengetam hasil bumi yang kalau dihitung-hitung lebih untung dari yang bisa kita peroleh sekarang.

“Dulu, peluh tidak pernah menjadi keluh, sekarang peluh deras keluhnya lebih deras lagi. Wereng asyik beranak pinak di rumpun - rumpun padi. Belum begitu hijau sawah sudah coklat duluan. Kalau tidak, ulat-ulat kecil brengsek itu yang mengganas. Mereka gerogoti batang dari dalam hingga pucuk - pucuknya tidak sampai menumbuhkan gabah bernas, berisi. Tunas - tunas jagung diserang belalang, daun - daun kedelai habis dimakan ulat. *Huffi*.”



Bapak menyedot pangkal rokok *tingwe*-nya. Bersama dengan menyalanya ujung rokok yang dia hisap, asap pekat hasil pembakaran tembakau mengalir deras dari mulut lanjut ke kerongkongan, lalu langsung memenuhi rongga paru - paru tuanya tanpa aba - aba. Bapak lalu mengembalikan sebagian ke udara, sementara sebagian kecil tertinggal di dalam. Aku dibuat heran olehnya, bapak merokok sejak usia belia tapi paru-parunya masih kuat sampai sekarang. *Yah*, beliau memang tidak pernah melebihi batas kewajaran dalam merokok, mungkin itu alasannya.

Mula-mula asap putih pekat itu menyembur deras, lalu membaur dengan udara di sekitarnya sebelum akhirnya menjadi semakin tipis dan lenyap menyisakan bau tembakau terbakar yang khas. Ketika hidungku menangkap baunya, aku mundur beberapa langkah. Aku tidak suka bau rokok, pun juga tidak aman berada di dekat asap rokok sekarang. Bapak paham, jadi tidak mengomentari langkah mundurku barusan dan lebih memilih untuk melanjutkan kesahnya. Setelah mantap dengan posisiku yang baru, kusiapkan kedua daun telinga berikut fokusnya

untuk penuturan bapak yang selanjutnya.

“Obat buatan sudah tidak mempan, pupuk tidak membikin gemuk. Harganya setinggi langit, manjurnya belum tentu. Dulu pupuk pabrik itu murah, gabah satu kuintal kalau dijual, uangnya bisa untuk membeli pupuk dua kuintal, malahan masih ada sedikit sisa. *Lah*, sekarang. Gabah se-kuintal nilai tukarnya kurang dari pupuk dengan berat yang sama,” lanjutnya dengan nada yang penekanannya diubah - ubah. “Pekerja di sawah sekarang juga sama manja. Dulu *derep* dengan seperdelapan bagian dari hasil panen itu sudah banyak. Sekarang kurang. Apalagi kalau panennya jelek, mereka melunjak. Ada yang minta dibayar uang yang nilainya setara dengan seperdelapan gabah bagus lah, ada yang sudah diberi bagian seperdelapan, masih minta tambahan uang barang berapa ratus ribu lah.”

“Lho, Pak? Bukannya ada dana bantuan dari pemerintah untuk menggantikan kerugian para petani yang lahannya diserang hama?” Tanggapku tiba - tiba.

“Bantuan pemerintah *piye*? *Mbok tak sunggi ndase ko kene teko alun - alun kutho*¹. Desa kita ini sudah agak jauh dari kota, *Le*. Meskipun kita tidak menempati puncak gunung yang rutenya dari kota harus melewati berliku, naik turun dan berbatu, “mata bantuan” yang kamu bilang itu melihatnya seperti itu. Mau ke sini ragu - ragu. Apalagi sudah bukan rahasia kalau di negeri tercinta kita ini berlaku ungkapan *soko nduwur grojog - grojog teko ngisor ithir - ithir*².”

Kata - kata bapak ada benarnya, tapi menurutku fenomena susahnya bertani di desaku sekarang ini tidak harus diamati dari kerangka pikir sesempit itu. Misalnya, barangkali saja obat - obatan pabrik yang sempat disinggung bapak itu bukan sudah tidak manjur lagi sekarang, tapi sejak awal memang hanya membunuh hama - hama yang tidak tahan padanya. Hama-hama yang tidak tawar pada sifat racun obat - obatan itu akan mati, sementara ada hama sejenis yang bisa bertahan.

Mungkin hama yang mampu bertahan ini terkena racun dari obat-obatan itu dalam dosis yang tidak berbahaya, tapi

¹ Biar kupanggul kepalanya dari sini sampai alun - alun kota.
² Dari atas melimpah, sampai bawah tinggal basah.

dari situ lalu tubuhnya mengembangkan kekebalan alami. Kita harus ingat bahwa hal-hal seperti ini di alam sangat sering terjadi, meskipun dalam kasus hama ini hanya perkiraanku saja.

Hama - hama yang selamat itu lalu beranak - pinak, dan anak - anaknya tentu kebal obat juga. Anak - anak hama itu lalu beranak lagi dan menghasilkan hama yang memunyai kekebalan terhadap obat lebih lanjut. Begitu seterusnya sampai populasi hama didominasi oleh hama yang kebal obat seperti sekarang ini. Jadi obat hama buatan mengandung dilema juga. Ia tidak selamanya efektif, belum lagi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penggunaan secara berlebihan. Akan tetapi tanpa obat itu, hasil panen tidak maksimal dan bahkan bisa juga terjadi gagal panen akibat serangan hama.

Adapun mengenai sulitnya para pekerja, bisa dijelaskan dengan peralihan pekerjaan yang kian marak. Orang yang setua bapak, di desaku, kalau tidak punya tanah pasti jadi buruh tani. Akan tetapi anak cucu mereka tidak mewarisi kebutuhannya orang tuanya. Begitu mencium bau upah yang menggiurkan hampir semua pemuda (dan pemudi) di desaku lebih memilih pergi ke kota atau bahkan luar negeri meski sebenarnya di sana hanya menjadi pekerja kasar atau asisten rumah tangga. Bahasa mereka “uang sana lebih mahal daripada uang sini, ngapain kerja di sini?”. Dari seratus orang, mungkin hanya satu dua yang “sukses” mengadu nasib, misalnya dengan menjalankan bisnis kecil tapi kemudian berkembang dan menjadi perusahaan besar. Orang kan juga tidak selamanya hidup, maka tidak heran jika jumlah pekerja di desaku kian surut.

Kalau pemerintah, aku tak tahu banyak. Aku hanya mendengar siul simpang siur dari dari beberapa teman yang bergerak di pemerintahan. Ada yang bilang “begini” dan ada yang bilang “begitu” tentang pemerintah. Hal itu sudah sangat wajar dalam dunia politik dan seringnya tidak dapat dipegang mana yang benar karena masing - masing hanya berjuang untuk kelompoknya sendiri meski semua mengatas namakan seluruh rakyat. Menurutku, fraksi mana pun yang kita bela, ujung-ujungnya selalu setali tiga uang alias sama saja, rakyat hanya menjadi korban atas tindak tanduk penguasa yang ingin mengisi perut

segelintir orang.

...

Uap yang melambung ke udara dari bibir cangkir bapakku sudah tipis meski isinya belum berkurang barang seteguk. Untukku, itu pertanda bahwa kopinya harus segera diminum karena aku tidak suka kopi yang terlanjur dingin. Akan tetapi bapakku tidak begitu, panas atau dingin selama rasa kopi dalam minumannya itu masih kuat tidak masalah. Bapakku memang orang penyuka kopi, istilah lokalnya *neki*. Orang seperti bapak bisa minum kopi lima sampai tujuh cangkir kopi dalam sehari tanpa pandang bulu. Artinya, bapak tidak membedakan kopi merk apa atau dari mana asalnya, yang penting kental dan benar-benar berasa kopi.

Lalu aku berpaling pada jabang bayi dalam gendonganku, anak yang dilahirkan setahun lalu dan sekarang tertidur pulas sembari menunggu ibunya selesai mencuci pakaian. Diam - diam, jauh dari perhatian bapak, kubisikkan beberapa patah kata ke daun telinganya yang keriput. “*Ngger*, anakku. Cerita kakekmu barusan adalah sepotong gambaran bagi upaya untuk menyambung nyawa yang mau tidak mau kelak akan kamu hadapi. Tentu Bapak tidak akan membiarkanmu tumbuh tanpa persiapan, tapi kelak akan tiba saatnya Bapak tidak berada di samping kamu lagi. Jika saat itu tiba, nasibmu berada di tanganmu sendiri. Kamu, pandai - pandailah dalam mengambil langkah. *Ya*?”

Mangunharjo, 12 Juli 2016





MENUNGGU matahari terbenam di sepanjang Pantai Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketika senja tiba, pantai yang berada tepat di samping Pelabuhan Semayang ini, akan banyak dikunjungi warga sekitar. Keindahannya pun banyak diperbincangkan di media sosial.

Menghidupkan Kembali Warkop DKI

Film Warkop DKI, Jangkrik Boss, menjawab kerinduan para penggemar kanosok trio warkop (Dono, Kasino, Indro). Menarik ditonton.

Generasi 80 dan 90-an pasti tidak asing lagi dengan grup lawak Warkop DKI. Grup yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro itu pernah tampil menghibur dan menghias industri film Indonesia. Sosok mereka yang konyol, lucu, dan selalu menghibur kini selalu menjadi bagian yang dirindukan dalam dunia lawak Indonesia.

Kehadiran Dono, Kasino, dan Indro itulah yang ingin dibawakan kembali oleh sutradara Anggy Umbara dalam film Warkop DKI *Reborn: Jangkrik Boss part 1* yang akan dirilis pada 8 September 2016 mendatang. Setelah berhasil membuat film dengan *genre* yang sama, *Comic 8: Casino Kings* (membus *box office*), kini Anggy mencoba menghidupkan kembali Warkop DKI dengan menampilkan peran Dono, Kasino, dan Indro yang lebih muda.

Peran Dono yang dibawakan oleh Abimana Aryasatya, Kasino (Vino G. Bastian) dan Indro (Tora Sudiro). Di dalam cerita tersebut, mereka beraksi di tengah hiruk pikuknya Kota DKI Jakarta sebagai personel sebuah Lembaga Swasta yang bernama CHIIPS (Cara Hebat Ikut-Ikutan Penanggulangan Sosial).

Walaupun di dalam diri mereka dipenuhi semangat yang menggelora dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat, namun kecauan dan huru-hara selalu mereka timbulkan akibat aksi mereka yang konyol dan selalu mengocok perut. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi bulan-bulanan banyak pihak, termasuk Bos mereka.

Sampai akhirnya sang Bos menghadirkan Sophie (Hannah Al Rashid), seorang personel profesional CHIIPS yang sangat cantik kiriman dari Perancis, untuk membantu tugas baru DKI (Dono, Kasino Indro) dalam menangkap para pelaku begal. Adegan-adegan lucu komedi-slapstick yang konyol maupun komedi-satire yang kekinian



terus terjadi memancing tawa sepanjang film, menghadirkan nostalgia masyarakat pada film-film Warkop DKI terdahulu. Film Warkop DKI *Reborn* ini akan menghidupkan rasa dan memanjakan para penggemarnya.

Dalam setiap filmnya selalu menayangkan lawakan-lawakan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Karenanya Warkop DKI *Reborn* akan dibalut dengan lawakan yang sesuai dengan *trend* masa kini. "Perbedaan paling kekinian, karena komedi *kan dinamis*. Kita mengikuti *standup comedy* yang saat ini sedang digemari masyarakat. Tapi saya minta maaf kalau masih ada sesuatu legendaris yang dimasukkan dalam film ini. Hal legendaris itu akan selalu diingat orang tentang Warkop DKI hingga kini," kata Indro yang didaulat sebagai Eksekutif Produser dalam film garapan tersebut.

Selain itu, karena sebagian cerita tersebut merupakan gabungan dari sepenggal cerita dari 34 film Warkop DKI terdahulu, film ini juga tidak terlepas



WARKOP DKI REBORN: JANGKRİK BOSS

Sutradara:
Anggy Umbara

Produksi:
Falcon Pictures

Release:
08 September 2016



dari perempuan seksi sebagai 'pemanis' yang dikemas dalam balutan komedi.

Namun sayangnya, penonton harus puas dibuat penasaran dengan sepenggal kekonyolan *part 1*. "Karena ada 34 film Warkop DKI yang pernah dirilis, kami akan bentuk film ini berbentuk sekuel. Nantikan ceritanya setelah *part 1* ini berjalan sukses," katanya.

Film garapan ulang dari Falcon Picture ini juga dibintangi oleh artis papan atas dan komedian ternama lainnya, seperti Agus Kuncoro, Ge Pamungkas, Babe Cabita, Arif Didu, Hengki Solaimin, Ingrid Widjanarko, Yudha Keling dan masih banyak lagi. *Wah*, penasaran bukan bagaimana aksi seru mereka dalam Warkop DKI *Reborn*? Saksikan di bioskop kesayangan Anda menjelang Idul Adha pada 8 September 2016 mendatang. (IFR)

Memotret Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia

Politik Indonesia pasca-Orde Baru membersihkan pesan terkait demokratisasi. Namun, arah transisi dan konsolidasi masih belum jelas terpetakan sekalipun berbagai kajian telah dilakukan.

Buku ini mendeskripsikan bagaimana dinamika transisi dan konsolidasi yang dialami bangsa Indonesia pada era reformasi dengan rentang isu cukup luas, mulai dari dinamika transisi demokrasi, perdebatan format baru pemilu era transisi, isu seputar hukum, konstitusionalitas, demokrasi, problematik sistem kepartaian, pemilu dan sistem perwakilan, hingga isu problematik pada umumnya secara luas.

Penulis, Valina Singka Subekti menuturkan dan menggiring pembaca untuk melihat bagaimana potret dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia melalui kumpulan tulisannya yang dibagi menjadi 6 bagian. Valina mencoba menarik benang merah sesuai dengan tema dan pengalaman tulisannya yang sudah banyak dimuat di media massa, dan makalah. Ia mencoba memetakan dari bagaimana dinamika konsolidasi berdasarkan tahun.

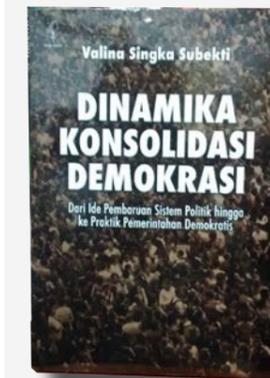
Pada bagian pertama, berisikan 16 tulisan terkait praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia periode 1999-2004 dengan beragam problem dan analisa. Pada ba-

gian ini, penulis mencoba memberikan pengantar filosofis tentang pentingnya pemilu sebagai pintu gerbang demokrasi bangsa, dengan menciptakan pemilu yang berkualitas baik dari segi penyelenggara maupun penyelenggara-

di beberapa negara. Penulis juga memaparkan bagaimana masa depan demokrasi Indonesia dengan empat tingkat perubahan rezim yang harus dilewati Indonesia untuk menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Bagian ketiga bertema "Komplikasi Sistem Presidensial" terdiri atas tiga tulisan. Yang membahas tentang perubahan mendasar sistem tata negara sebagai hasil amandemen UUD 1945 yang bertujuan mengantarkan Indonesia menuju demokrasi dengan mengatur kembali distribusi kekuasaan trias politica dan memperkuat sistem presidensial melalui inte-

INFORMASI BUKU



Judul Buku	: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis
Penulis	: Valina Singka Subekti
Penerbit	: Yayasan Obor Indonesia
Tahun	: 2015
Harga	: Rp. 90.000
Tebal	: 316 Halaman

raan. Penulis juga menyampaikan pembahasan kontekstual dan potret sistem politik Indonesia yang tengah berproses.

Bagian kedua, bertemakan "Politik Konstitusional dan Demokratisasi" terdiri dari tujuh tulisan. Tulisan pertama tentang "Kekerasan Politik dan Perubahan Politik", penulis mencoba menjelaskan bagaimana kekerasan politik dan berbagai negara, serta menunjukkan sejarah politik dan hasilnya

grasi dengan sistem pemilu yang dinilai mampu menyederhanakan partai.

Pada bagian keempat, penulis membahas mengenai keterwakilan politik melalui DPR dan DPD yang sudah cukup mewakili letak geografis Indonesia yang beragam. Ugagasan dan analisis yang cermat membuat beragam bidang dengan dinamika politik yang kompleks menjadi mudah untuk dicerna.

Bagian kelima, penulis membahas soal Gender dan Politik. Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana konstruksi sosial yang telah tercipta melalui *stereotype* relasi dan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, termasuk di ranah publik dan privat. Penulis sangat memperjuangkan bagaimana seharusnya peran domestik mensubordinasikan perempuan dari kontribusi perempuan dalam pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Valina menjelaskan bagaimana perempuan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perumusan kebijakan publik dengan menduduki jabatan politik, hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya partisipasi perempuan dalam mengambil kebijakan.

Pada pembahasan akhir, penulis menulis tentang bagaimana menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, kode etik dan *inclusiveness* dalam pemilu. Yang menjelaskan tentang pembentukan, peranan, fungsi, dan kinerja DKPP sebagai komisi yang mengawasi kode etik penyelenggaraan pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Pembahasan dilakukan dengan sangat berhati-hati sehingga tidak mengesankan bahwa penulis tengah memaksa untuk terjebak dalam kerangka pikir formal tung-

gal. Ketiga, memberikan jawaban atas pertanyaan klasik bahwa sistem politik telah berubah dan mengarah pada suatu tujuan.

Pertama, mengulas pelembagaan sistem politik Indonesia di mana di dalamnya dibahas mengenai sistem politik demokratis, sistem perwalian, kepartaian, sistem pemilu, dan budaya politik pemilih. Selain itu, penulis juga mengurai pembahasan meliputi hubungan pembangunan, desentralisasi sampai hal mendetail seperti hubungan kepala daerah, DPRD, dan masyarakat. Sementara bagian ketiga menengahkan tema birokrasi, militer, dan kelompok kepentingan.

Gagasan utama yang melatari buku ini berasal dari fakta bahwa Indonesia tengah berproses menuju sistem politik yang demokratis. Secara prosedural demokrasi telah berjalan, tetapi dari segi substansial masih terdapat berbagai paradoks. Hal ini yang membuat demokratisasi tidak bisa berjalan dengan cepat dan efektif.

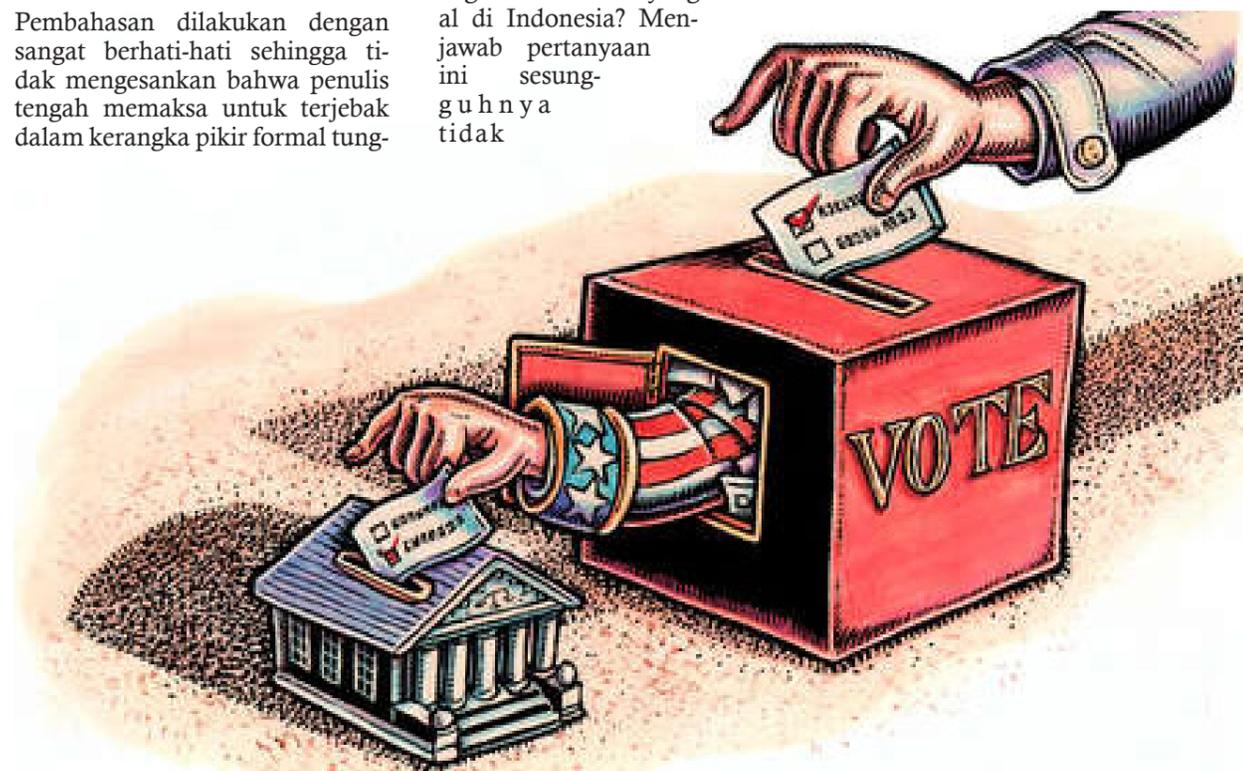
Pertanyaan penting yang acap kali keluar dari para sarjana politik adalah bagaimana model pelembagaan demokrasi yang ideal di Indonesia? Menjawab pertanyaan ini sesungguhnya tidak

mudah.

Buku ini bisa memberikan petunjuk. Gagasan lain yang berisi solusi tampak ketika membahas tentang penyederhanaan partai. Elite partai yang tidak lolos dilarang mendirikan partai pada dua kali pemilu berikutnya secara berturut-turut.

Selain memberikan analisis terhadap fenomena politik dan menawarkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi, buku ini juga menitikberatkan pada penilaian terhadap sistem yang sudah bekerja. Upaya reformasi birokrasi yang banyak digembar-gemborkan oleh pemerintah dalam memberikan jaminan atas netralitas politik dan meningkatnya kapasitas pelayanan disikapi dengan kritis.

Bagi penulis politisasi birokrasi sangat erat dengan kepentingan agar pemerintahan bisa dikontrol dengan penuh. Akibatnya, profesionalitas birokrasi menjadi terganggu dan alokasi serta distribusi sumber daya berlangsung secara tidak adil. Hanya segelintir kelompok masyarakat, yang sesuai dengan afiliasi politik dari politisi, yang akan menikmatinya. (IFR)



Kemendagri Lakukan Deteksi Dini Cegah Kisruh Pilkada

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan upaya antisipasi sebagai deteksi dini penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyampaikan dengan adanya Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) mampu memotret kerawanan yang mungkin terjadi. IKP ini dilakukan dengan cara memetakan dan memberi skor kerawanan di 101 daerah Pilkada serentak 2017.

"IKP ini juga sebagai alat baca untuk memetakan daerah dan juga sebagai pengawasan preventif atau *early warning* (peringat dini)," ungkap Tjahjo

Tjahjo mengungkapkan beberapa hal yang menjadi antisipasi dalam Pilkada 2017 yakni masalah pemungutan suara, perekapan suara, dan penetapan pemenang.

"Kita harus mengantisipasi ancaman terorisme, adanya tindakan anarkis seperti pembakaran, kekerasan, keributan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam pemungutan suara juga harus dihindari yang namanya "*money politik*". Tjahjo meminta, dalam perekapan suara nantinya diharapkan tidak adanya kecurangan serta penguluran waktu.

"Ya, dalam merekap hasil suara nantinya yang menjadi perhatian kita yakni terkait dengan kejahatan konvensional, serta kecurangan dan ketepatan dalam penghitungan suara," tutup Tjahjo.

Dia berharap dengan disusunnya IKP yang baru dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29 Agustus 2016) mampu memotret beberapa aspek yang ditengarai sebagai daerah rawan dan potensial memunculkan pelanggaran pada Pemilihan Pilkada (Pilkada) serentak tahap II, pada 2017 mendatang. IKP ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* Pilkada, termasuk KPU RI, KPUD, Kepolisian, Intelijen dan Kemendagri.

Sementara itu, Peneliti Para Syndicate Institute, Toto Sugiarto menyebutkan, Penyusunan IKP ini berdasarkan data pengawasan pada pileg, pilpres, dan pilkada terakhir. "Potret IKP relatif baik karena tidak hanya berdasarkan persepsi, melainkan juga data," ujar Toto.

Menurut dia, potret IKP itu berisi kerawanan dari sisi pengawasan dan demokrasi. jadi tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi menyeluruh dan komprehensif. "IKP bawaslu memotret kerawanan di setiap tahapan dimensinya, pada penyelenggara, partisipasi, dan kontestasi," pungkask Toto. (IFR)

(diolah dari berbagai sumber)

KIAT MELAKUKAN TANAM BENANG



Sebelum melakukan tindakan tanam benang di wajah, sebaiknya Anda mengumpulkan informasi mengenai metode ini. Lakukan konsultasi mendetail terkait prosedurnya, apa saja yang perlu dilakukan, siapa saja yang boleh melakukan, dan sebagainya.

Jalankan syarat dan pantangan yang harus dihindari sebelum dan setelah dilakukan tindakan.



Kontrol segera ke dokter apabila ada keluhan.

Pasien disarankan 1-2 minggu setelah tindakan agar dapat dilakukan touch up apabila ada yang dirasa kurang.



Pilih dokter/ klinik yang memang sudah terpercaya melakukan tindakan tanam benang.



TINDAKAN TANAM BENANG INI HANYA BOLEH MELAKUKAN DOKTER YANG TELAH MENJALANI PELATIHAN PROSEDUR TANAM BENANG

Tanam Benang, Baikkah?

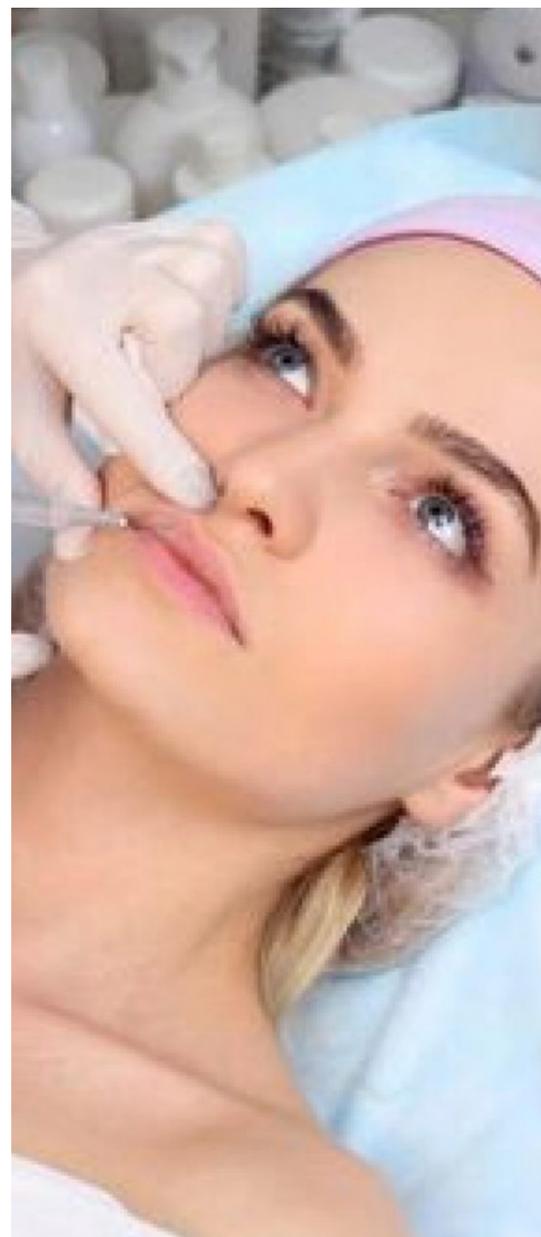
Penuaan merupakan proses alami dan bisa terjadi pada siapa saja. Selain faktor usia, proses penuaan dini dapat terjadi dalam diri seseorang, misalnya akibat paparan sinar matahari, faktor zat kimiawi, seperti kebiasaan yang tidak sehat misalnya minum alkohol, merokok dan kurang istirahat. Namun demikian, seiring perkembangan dunia kecantikan, faktor penuaan ini dapat diatasi dengan berbagai macam cara, seperti prosedur tanam benang. Lantas seperti apa metode tanam benang di wajah? Apa saja efek sampingnya?

Mengenal Tanam Benang

Tanam benang di wajah merupakan prosedur atau tindakan memasukkan benang halus khusus ke dalam lapisan bawah kulit yang berfungsi untuk mengencangkan area wajah yang kendur akibat proses penuaan.

Menurut dr. Sari Chairunnisa, SpKK, tujuan tanam benang adalah untuk mengencangkan area wajah yang kendur akibat proses penuaan, meniruskan wajah, memunculkan hidung, menghilangkan kerut di dahi antara alis mata, sekitar mata, kerut di bawah mata dan leher.

Benang ini mampu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan



peredaran darah dan mengencangkan kulit. Umumnya tanam benang di wajah paling sering dilakukan di area dahi, pipi, hidung dan dagu. Tindakan tanam benang memang terdengar menyeramkan. Padahal sebenarnya tindakan tanam benang dibanding operasi plastik cenderung minim risiko dan harganya relatif terjangkau, tambahna.

Siapa yang Boleh Melakukan?

Prosedur tanam benang dapat dilakukan pada pasien usia dewasa, sehat secara fisik, (terutama tidak ada infeksi atau luka terbuka pada area yang dilakukan tindakan) dan sehat psikis. "Orang dengan penderita diabetes boleh saja melakukan asalkan gula darahnya terkontrol. Begitu pula juga dengan penderita hipertensi selama tekanan darahnya terkontrol. Selain ibu hamil dan menyusui, tindakan tanam benang di wajah tidak dianjurkan pada orang yang memiliki bakat keloid karena risiko membekas paska tindakan," ungkap dokter Sari.

Prosedur Tanam Benang

Tindakan tanam benang ini menggunakan benang halus yang terbuat dari *polidioxanone*. Sementara jarum yang digunakan adalah jarum yang terikat dengan benang, jadi hanya sebagai pemberi 'jalur'.

Sebelum melakukan teknik tanam benang, dokter meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur yang biasa digunakan untuk *facial treatment*. Kemudian wajah atau area yang akan diberikan *thread lift* dibersihkan terlebih dulu.

Setelah bersih, pada area tersebut dibalurkan semacam krim anastesi yang tebal, dengan sensasi rasa yang dingin sekali, wajah seperti ditempel es batu.

Selanjutnya tunggu 30 menit, hingga krim anastesi bekerja. Setelah itu, sisi wajah yang akan dipasang *thread lift*, dibersihkan

dengan spons steril. Wajah diberikan "mark" atau tanda menggunakan sejenis pensil untuk peletakkan *thread lift*. Pada setiap mark kemudian oleh dokter dimasukkan benang-benang tersebut sesuai lajur yang telah diberi mark.

Pengerjaannya harus dilakukan hati-hati, oleh karenanya tindakan tanam benang ini hanya boleh dilakukan dokter yang telah menjalani pelatihan prosedur tanam benang. "Pada saat dimasukkan benang, pasien tidak akan merasakan sakit, karena efek dari krim anastesi yang dioleskan ke wajah sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai ambang nyeri yang berbeda-beda. Sementara untuk durasi



pengerjaan ditentukan oleh luas area wajah yang akan dikerjakan. Tapi biasanya membutuhkan waktu yang sangat singkat yaitu sekitar 15 sampai 30 menit.

Setelah pengerjaan dapat dilakukan *touch up* kembali setelah 1 bulan dilakukan tindakan tanam benang kalau masih ada yang dirasa kurang. Oleh sebab itu, tanam benang bisa diulang kembali setelah 1 sampai 2 tahun, karena efeknya juga sudah berkurang," paparnya

Efek Samping

Pasca-*thread lift*, kulit wajah akan terasa kencang dan ketat yang akan berkurang dalam waktu 2 hingga 3 hari. Mungkin ada lebam karena bekuan darah di beberapa

tempat yang akan hilang dalam waktu 3 hari. Hal ini wajar terjadi karena umumnya pasca tindakan bisa saja terjadi proses peradangan pada lokasi dilakukannya tindakan yang akan membaik dalam waktu hitungan hari. "Efek samping yang umum terjadi adalah adanya memar, perdarahan, bengkak, dan nyeri tekanan pada area dilakukannya tindakan. Setiap tindakan yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasti punya risiko terjadinya peradangan," imbuhnya lagi.

Syarat & Pantangan

Sebelum *thread lift*, pasien dianjurkan tidak mengonsumsi obat-obatan atau jamu serta tidak mengonsumsi vitamin E selama kurang lebih 1 minggu.

Mengapa? "Karena kita kadang tidak tahu pasti apa isi jamu, dikhawatirkan mengandung produk herbal yang bisa mengganggu pembekuan darah," jelasnya.

Pantangan yang harus diperhatikan pasien setelah melakukan tanam benang di wajah adalah tidak melakukan prosedur *laser*, *radiofrequency*, *chemical peeling* selama 1 bulan agar tidak mengganggu kerja dan posisi benang.

Berapa Biayanya?

Umumnya biaya tergantung dari luas area yang akan dikerjakan, namun kisarannya berkisar 5-6 juta rupiah.

Konsultan:

dr. Sari Chairunnisa, SpKK

Bamed Skin Care - Dharmawangsa Square

Opini Domoe Abdie

KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA DAN IMPLIKASINYA

Wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang bergulir. Kebijakan pun bak jamur di musim hujan, ada yang melarang, tetapi tidak jarang pula yang melegalkan. Wacana semakin menguat, kala diusung tujuan mulia demi menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi perkembangan ibu kota negara. Selain itu, alasan akan tingginya permintaan akan lahan hunian maupun pengembangan kawasan ekonomi bisnis dituding sebagai pemicu timbulnya kebijakan reklamasi.

Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurangan dan penerangan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an. Di Indonesia, setidaknya ada empat wilayah yang hendak dan telah direklamasi. Wilayah tersebut di antaranya Pantai Losari di Makassar, Teluk Benoa di Bali, Teluk Talisse di Palu, dan Pantai Utara di Jakarta.

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta saat itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi. Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda No 8 Tahun 1995. Namun, munculnya dua kebijakan ini menabrak Rencana Umum Tata Ruang

(RUTR) Jakarta 1985-2005. Dalam dokumen RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

Kebijakan terkait reklamasi tidak memerhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya dan keberlanjutannya di masa mendatang. Tanpa didasari regulasi yang pasti, kebijakan reklamasi rawan dipolitisasi pihak berkepentingan dan memiliki agenda terselubung.

Tarik ulur kebijakan

Tarik ulur kebijakan para pemangku kepentingan dimulai sejak 1995. Sejak itu, perang aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dimulai. Kementerian Lingkungan Hidup dalam berbagai kebijakannya menyebutkan, reklamasi tidak layak lagi dilakukan karena akan merusak lingkungan. Selain itu, Keputusan Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan. Selanjutnya, reklamasi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendapat perlawanan keras dari aktivis lingkungan dan akademisi serta para masyarakat nelayan di Pesisir Jakarta Utara.

Seiring dengan tuntutan perkembangan kota dan kawasan ekonomi (niaga dan bisnis), maka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bergerak ke arah privatisasi. Terlebih setelah pemerintah mengeluarkan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK). Melalui UU PWP-PPK pemerintah memperkenalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) termasuk kepada sektor swasta, baik nasional maupun asing.

Pada 2011, keadaan berbalik. Mahkamah Agung secara tiba-tiba mengeluarkan putusan No 12/PK/TUN/2011 yang menyatakan "Reklamasi di Pantai Jakarta adalah Legal." Saat rencana reklamasi terkatung-katung dan terkendala oleh berbagai aturan yang menghadangnya, maka pada 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang di dalamnya menyetujui adanya praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Pada 2012, Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan Pergub No 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta. Proyek ini pun kembali berjalan.

Sebanyak 17 pulau yang akan dibangun di kawasan Teluk Jakarta, mulai dari pulau A hingga Q. Tiga kawasan akan membagi pulau ini. Kawasan barat untuk pemukiman dan wisata. Kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial. Sedang kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

Sempat muncul kajian penghentian sementara (moratorium) Kementerian Kelautan dan Perikanan reklamasi. Reklamasi diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Di luar itu, tidak boleh ada reklamasi untuk hotel, apartemen, mal, dan sebagainya. Moratorium yang masih berupa kajian tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan reklamasi. Akhir Oktober 2015, Pemprov DKI menyatakan mulai mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi. Pulau O, P, dan Q akan diintegrasikan dengan Pulau N untuk pembangunan Port of Jakarta.

Rekomendasi kebijakan

Memang persoalan reklamasi masih menyisakan kontroversi yang berkepanjangan, baik dari para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak terkait lainnya, untuk itu yang perlu dilakukan adalah Kodifikasi terkait aturan pelaksanaan reklamasi.

Sejauh ini, setidaknya terdapat empat peraturan tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta, di antaranya Keppres No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta, Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, Perpres No 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari UU Nomor 27 Tahun 2007.

Reklamasi juga harus memerhatikan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya yang terdapat pada Pasal 65 menyatakan Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran yang dimaksud harus dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Tidak terlaksananya penataan ruang bagi pembangunan secara efektif dan efisien, sebagai akibat dari tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang. Masyarakat harus terlibat pada tiga tahap penataan ruang dengan tingkat kesertaan dan mekanisme yang berbeda. Tahapan-tahapan tersebut yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Ada pun yang terjadi selama ini hanya pada tahap perencanaan saja.

Dinamika perkembangan kota justru lebih sering terjadi di luar rencana yang ada. Oleh karena itu, masyarakat harus secara aktif berperan dalam proses pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khususnya yang menyangkut proses pembangunan dan pengendalian ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta yang sangat intens.

Yang perlu diperhatikan pula adalah UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai hendaknya dipakai sebagai acuan rencana pembangunan pada masa yang akan datang.

Selain itu, izin lokasi merupakan dasar dalam pemberian izin pengelolaan. Sebagai perubahan atas UU No 27 Tahun 2007, UU No 1 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan izin lokasi tidak dapat diberikan pada zonasi inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Izin tersebut hanya diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk luasan dan waktu tertentu. Selain itu, pemberian izin juga semestinya mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat,



Domoe Abdie,
Plt. Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Sepanjang terkait dengan penataan ruang, Keppres No 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, tidak berlaku. Karena sudah tergantikan oleh Perpres No 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Ada pun Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, yang mengubah aturan pulau-pulau reklamasi dalam Perda DKI Jakarta No 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta, muncul karena sudah tidak berlakunya Keppres No 52 Tahun 1995.

PP No 26 Tahun 2008 menetapkan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu, Banten, dan Jawa Barat ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Maka dari itu, perlunya penjelasan spesifik tentang KSNT dan KSN. Karena kedua hal tersebut sering menjadi perdebatan berbagai pihak yang menafsirkan, tidak ada perbedaan antara kedua kawasan tersebut.

Perdebatan tersebut dipicu karena adanya aturan dalam Pasal 50 Ayat 1 UU No 1 Tahun 2014 yang menyatakan kewenangan menteri dalam izin lokasi izin pengelolaan wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau lintas provinsi, KSN, KSNT, dan kawasan konservasi nasional. Padahal, secara tegas UU No 1 Tahun 2014 tidak lagi mengacu pada Keppres No 52 Tahun 1995,



Perpres No 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hanya mengatur permohonan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi diajukan kepada menteri, gubernur, bupati, atau walikota. Menteri dalam hal ini, memberikan izin lokasi dan izin reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.

KSNT dan reklamasi lintas provinsi, bisa diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati atau walikota dan gubernur. Sementara, gubernur dan bupati atau walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai kewenangannya. Selain itu, kegiatan reklamasi hanya pada sektor pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

dan hanya membahas izin pengelolaan dan izin lokasi. Sementara Keppres No 52 Tahun 1995 membahas izin prinsip dan izin pelaksanaan. Kedua hal tersebut tentu sangat berbeda.

Reklamasi 17 pulau di kawasan Teluk Jakarta akan diintegrasikan melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang disebut Program Garuda Project, yang sudah direncanakan Presiden Joko Widodo, sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kabinet Terbatas 27 April 2016. Atas dasar itu pula, maka secara otomatis, pulau G yang memiliki luas 161 hektar tersebut dibangun berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

KILAS BERITA



Tuntaskan e-KTP Kemendagri Ingin Pemilu 2019 Gunakan e-Voting

JAKARTA - MKementerian Dalam Negeri ingin electronic voting atau evoting dilaksanakan pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) basis datanya.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan pihaknya ingin persoalan eKTP tuntas pada 2017, sehingga pemerintah dapat melakukan persiapan pelaksanaan evoting untuk Pemilu 2019. "Kami memang berharap eKTP selesai pada 2017, karena persiapan Pemilu 2019 dengan evoting akan mulai dilakukan pada 2018. Pelaksanaan evoting juga menyaratkan eKTP," katanya,

Tjahjo menuturkan penyelesaian data kependudukan harus tetap dilakukan, meskipun blanko untuk eKTP sedang habis. Dia pun meminta masyarakat untuk melakukan perekaman data kependudukan, agar memperoleh nomor induk kependudukan (NIK) tunggal.

NIK itu nantinya akan tercatat secara manual dan dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat telah melakukan perekaman data kependudukan. Untuk dapat memperoleh eKTP, masyarakat dapat mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

"Warga Jakarta dapat langsung mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, untuk mendapatkan eKTP dengan cepat," ujarnya.

Tjahjo juga menjamin kemudahan dalam mengurus eKTP, karena tidak lagi menggunakan surat pengantar dari Ketua Rukun Tangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW)

Selain itu, pihak Kemendagri menjamin tidak ada cerita blanko kosong. Sebenarnya blanko e-KTP tersedia di Dukcapil pusat atau di Dukcapil kabupaten/kota. Tinggal petugas kelurahan atau kecamatan mau mengambilnya atau tidak.

"Biasanya, kalau orang kecamatan mau ngeles, misalnya dia belum sempat ambil, ya dia bilang blanko kosong. Atau dari kabupatennya yang belum ambil kesini. Atau mungkin blankonya ada di kabupaten, tapi belum sempat dikomunikasikan ke kecamatan. Kita kendalikan blanko dari sini. Setiap hari kita produksi," jelas Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha di kantornya di Pasarminggu, Jaksel

Menurut dia, kecamatan hanya mendapatkan berita bahwa blanko kosong dari kabupatennya. Soalnya di kecamatan tidak pernah ada blanko, kecamatan itu hanya merekam saja. "Hasil rekamannya itu dikirim ke kabupaten, di kabupaten dicetak. Blanko itu ada di kabupaten," jelas dia.

Dia memastikan untuk tahun ini blanko selalu tersedia. Jadi sekali lagi tidak ada alasan blanko kosong. "Tahun 2016 Blanko itu ada terus. Setiap kabupaten yang blankonya habis, dia akan langsung ambil kesini. Kalo ada yang bermasalah, itu berarti masalah internal di sana. Secara umum blanko tidak ada masalah," tutup dia. (IFR)

Opini Djoko Sulistyono

PENDANAAN BAGI PENELITI

Jumlah hak paten dan publikasi ilmiah Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai salah satu indikator utama keunggulan dan produktivitas, peneliti pun dituntut lebih kompetitif dengan negara lain dalam meningkatkan keduanya. Namun, hal demikian tidak akan mudah dilakukan, mengingat dukungan infrastruktur kegiatan riset di Indonesia masih terbilang rendah. Perhatian pemerintah kepada peneliti juga belum bisa dikatakan serius.

Berdasarkan data World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia hanya memiliki 541 hak paten. Hal tersebut lebih rendah jika dibanding negara-negara lain di Asean seperti Malaysia yang sudah memiliki 1.076 hak paten, Singapura 1.056 hak paten dan Thailand yang sudah memiliki 927 hak paten. Lebih kalah lagi jika dibanding negara-negara di dunia seperti Tiongkok (415.892), Jepang (287.580), dan Amerika Serikat yang sudah mengoleksi 247.750 hak paten.

Begitu juga dengan ranking publikasi ilmiah Indonesia yang berada di bawah negara-negara Asean. Indonesia menempati peringkat ke 57 dari 236 negara. Sampai 2015, Indonesia baru menerbitkan 37.729 publikasi ilmiah, jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia yang berada di

peringkat 35 dan sudah menerbitkan 175.146 publikasi ilmiah. Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan, tantangan Indonesia cukup besar dalam upaya meningkatkan keduanya.

Pada era masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*), hasil kelitbangan harus dapat menghasilkan nilai tambah yang kompetitif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun menuntut kerasnya kompetisi dalam menghasilkan penemuan inovatif yang berguna untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Artinya, selain berguna di masyarakat, inovasi bisa dipakai oleh kalangan industri.

Namun, tuntutan kerasnya kompetisi berbanding terbalik dengan industri di Indonesia yang kurang mengapresiasi hasil penelitian. Situasi tersebut dikarenakan, traumatik industri terhadap hasil penelitian Indonesia. Hasil penelitian sering dianggap kurang kompetitif, di sisi lain juga dianggap terlalu mahal dan terkesan komersil. Pada kenyataannya, banyak para inovator tidak diperhitungkan. Hasil riset pun terbengkalai, tidak sedikit hasil-hasil penelitian anak bangsa sendiri akhirnya dipatenkan oleh negara lain.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan sumber daya

peneliti yang memiliki kemampuan riset andal. Tantangan tersebut bisa dijawab manakala pemerintah memerhatikan juga biaya riset. Karena pada dasarnya pendanaan riset memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan peneliti. Lebih utamanya, ketika peneliti bisa memublikasikan dan mengomunikasikan hasil temuannya. Tidak hanya itu, upaya memberdayakan peran riset terhadap kebutuhan industri, pasar, kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat, juga perlu dibumikan.

Pendanaan bagi peneliti

Saat ini, alokasi dana penelitian yang ada di lembaga penelitian pemerintah dan swasta masih terbilang minimal. Dukungan pembiayaan infrastruktur kegiatan riset pun sangat rendah. Dana yang tersedia tidak memungkinkan untuk melakukan proses penelitian secara komprehensif, dari tahap awal atau dasar, hingga kemudian dapat dipresentasikan kepada kalangan industri dan masyarakat luas.

Selain dana penelitian, biaya khusus untuk peneliti pun menjadi masalah berkepanjangan dan hampir tidak ada solusi untuk dipecahkan. Bagi para peneliti yang berada di pemerintahan, keberadaan infrastruktur penelitian tentu sangat dibutuhkan. Alat-alat penelitian sangat berpengaruh terhadap riset yang dihasilkan.

Para peneliti Indonesia tidak memiliki penghasilan jelas dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tidak mengherankan jika sejumlah peneliti lebih suka melancong ke luar negeri. Baik untuk bermitra maupun bekerja dengan lembaga

penelitian luar negeri. Kecanggihan dan kelengkapan fasilitas menjadi alasan logis, pembiayaan secara penuh juga menjadi alasan utama.

Para peneliti memilih untuk menetap di beberapa negara dengan gaji tinggi. Seperti Malaysia yang saat ini menetapkan gaji 45 juta rupiah per bulan, Amerika yang menetapkan sekira 90 juta rupiah per bulan, serta Jepang yang menjanjikan 600 juta rupiah per bulan. Para peneliti Indonesia pun banyak yang berhasil menjadi orang-orang penting di negara lain. Jangan heran ketika mendengar profesor di Chiba University, Jepang, profesor di Cornell University, Amerika Serikat, profesor ilmu komputer di Universitas Utrecht Belanda, dan astronom Jepang mereka adalah orang-orang Indonesia.

Secara positif, permasalahan yang terjadi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para peneliti. Baik yang berada di lembaga pemerintah, swasta, kalangan usaha, maupun akademik. Dalam konteks tersebut, upaya meningkatkan kemampuan penelitian merupakan sebuah kewajiban. inovasi yang memiliki daya saing menjadi tuntutan yang harus dibuktikan.

Sebagai harapan bangsa terhadap ilmu pengetahuan, para peneliti diharapkan dapat menciptakan hal baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Para peneliti juga diharapkan berperan penting dalam menciptakan berbagai *prototype*, desain, *pilot project*, alat-alat pertanian dan produk inovasi lainnya yang berguna serta dapat menghasilkan hak paten, maupun dideseminasikan kepada industri, pemerintah, dan masyarakat secara luas.



Djoko Sulistyono,
Peneliti Madya
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemendagri



Pencoleng Tambang

Media mewartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar para pencoleng yang bermain pada 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Menurut KPK, ada lebih dari 5.000 IUP yang diidentifikasi. Dari data itu ada 3.966 IUP bermasalah yang diduga dimainkan para pencoleng. Terkait nilai nominal ekonominya, Kementerian Keuangan menyatakan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor tambang minerba mencapai Rp 18,6 triliun pada 2015. Sedangkan sektor migas, PNBP sendiri diproyeksikan mencapai Rp 130 triliun. Angka itu tentulah sangat menggiurkan bagi para pencoleng.

Salah satu pencoleng tambang yang tergiur dan diincar KPK adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Selasa lalu (23/8), KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pemberian izin pertambangan. Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan Nur Alam dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sultra.

Sebagaimana modus operandi para pencoleng, tindakan coleng-mencoleng ini biasanya melibatkan banyak pihak. Pada kasus ini, pihak yang dilibatkan Nur Alam di antaranya adalah Bupati Buton dan Bupati Bombana. Pelibatan para bupati ini menjadi ironis sebab kalau merujuk UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan perizinan Pertambangan, Energi maupun Kehutanan menjadi urusan Provinsi, bukan lagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Per 2 Oktober 2014, bupati/wali kota tidak punya kewenangan lagi urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Puncak gunung es

Terlebih lagi sekarang ini sudah keluar juga Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 4.E/20/DjB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dalam kasus Nur Alam, menurut KPK, meski penerbitan izin pertambangan telah diserahkan kepada gubernur, bupati di Buton dan Bombana, diduga ikut merekomendasikan penerbitan izin pertambangan nikel kepada Gubernur Nur Alam.

Kiprah para pencoleng inilah yang senyatanya memiskinkan bangsa ini. Kasus Nur Alam sejatinya hanyalah puncak

gunung es persoalan izin tambang yang diobral murah oleh para penguasa berpredikat pencoleng. Masih banyak para pencoleng tambang di daerah lain yang belum dicokok KPK atau pun kejaksaan. Sehingga, tidak heran kalau Indonesia yang kaya raya bahan tambang ini masyarakatnya masih tetap miskin dan tidak sejahtera.

Fakta dan kondisi itu merupakan ironi dan mengkhianati amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kondisi masyarakat di lokasi yang kaya akan bahan tambang itu ibarat pepatah, "ayam mati di lumbung padi". Padahal, kekayaan tambang yang dikeruk oleh sejumlah pencoleng itu menyebabkan tragedi kemanusiaan dan lingkungan di banyak tempat.

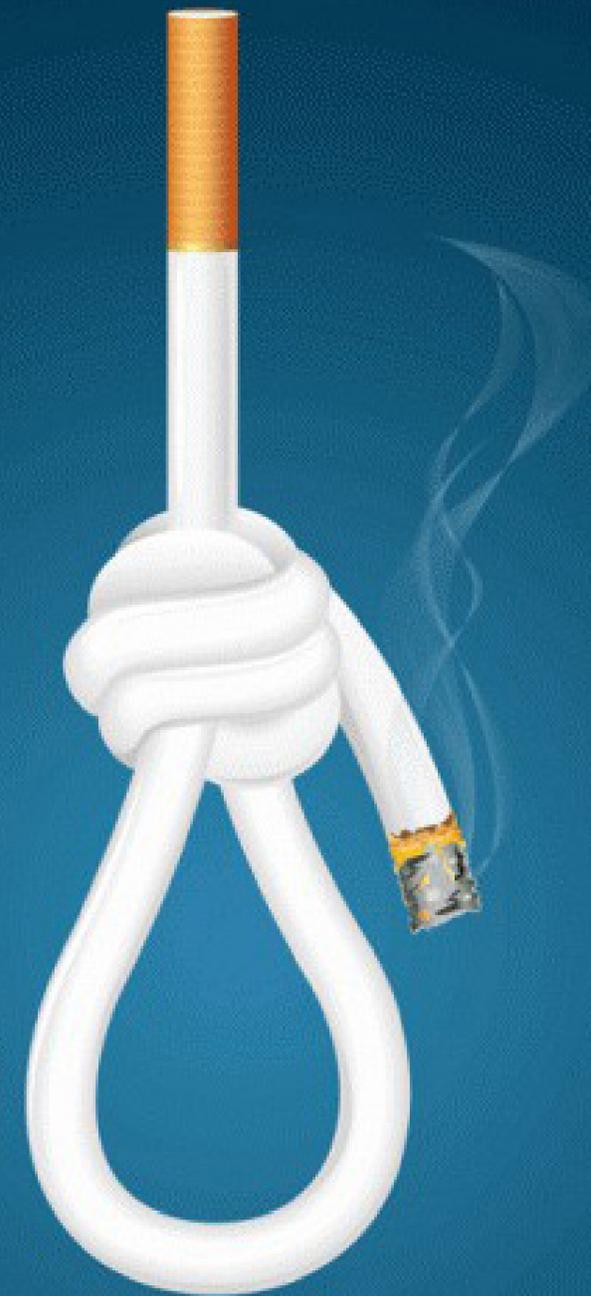
Sebagai contoh Kabupaten Bombana yang sempat dicoleng Gubernur Nur Alam. Di sana, kemiskinan masih menjadi momok. Masih banyak warganya hidup di tengah garis kemiskinan. Padahal di wilayah itu dikenal memiliki kekayaan sumber daya mineral melimpah, seperti emas dan nikel. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, mencatat di dalam bumi kabupaten berpenduduk sebanyak 139.235 jiwa itu terdapat butiran emas kurang lebih 1.125.000 metrik ton. Soal tambang nikel, paling tidak 51 ribu ha luasnya. Bayangkan, betapa banyak nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari luas tambang nikel seperti itu.

Pengawasan ketat

Tambang emas dan nikel di Kabupaten Bombana diketahui masyarakat sejak tahun 2000-an. Tetapi, kondisi ini malah membuat para warga hidupnya makin sengsara. Sebab, para petani di wilayah itu justru beralih menjadi penambang tradisional. Akibatnya, sawah mereka tidak digarap lagi. Kehadiran tambang di Bombana tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan hanya membuat warga semakin miskin. Terutama bagi mereka bermukim di sekitar kawasan tambang. Hingga kini, Bombana masih tercatat sebagai salah satu dari tiga kabupaten tertinggal di Sultra.

Lantas, apakah kita akan membiarkan daerah lain di negeri ini bernasib sama seperti Bombana? Tentu saja tidak! Belajar dari kasus Nur Alam, kini sudah saatnya konsentrasi pengawasan pemerintah pusat utamanya penegak hukum ditumpukan pada izin tambang. Sebab, potensi korupsinya teramat besar. Para pencoleng tambang di pusat maupun daerah harus dibasmi. Pengendalian IUP pun harus diperketat. Kalau perlu, pemerintah harus berani melakukan moratorium atau penundaan penerbitan IUP. Selama moratorium, pemerintah pusat dan daerah harus berhenti menerbitkan IUP baru dan melakukan evaluasi dan verifikasi secara langsung ke lapangan, terutama terhadap kawasan pertambangan dan IUP yang diduga bermasalah.

● Moh Ilham A Hamudy



ROKOK...

SETIAP ROKOK YANG ANDA ISAP,
DAPAT MEMOTONG USIA ANDA SEBANYAK 11 MENIT

JURNAL
BINA
PRAJA

CALL FOR PAPERS

Researchers, lecturers,
and public administration experts
are invited to contribute
their scientific papers
to Jurnal Bina Praja

THEME

Home Affairs Governance

Published
twice a year
in May
and November

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance

Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

TERMS & CONDITIONS - Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 39000-41000 characters (no space) in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper
on the theme of Home Affairs Governance
to jurnalbinapraja@yahoo.com

Published by:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Indexed by:



Accredited No. 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016